

DISERTASI

ORANG BUGIS PERANTAU
Pola Interaksi Sosial di Kota Samarinda dan Kota Palu

THE BUGIS MIGRANTS

***A Study On Their Social Interaction Pattern In The Cities Of
Samarinda and Palu***

JAMALUDDIN ISKANDAR
P0604303005



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2008

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Disertasi : **ORANG BUGIS PERANTAU
Pola Interaksi Sosial di Kota Samarinda dan Kota Palu**

Nama Mahasiswa : **JAMALUDDIN ISKANDAR**

Nomor Pokok : **P0604303005**

Menyetujui;
Komisi Penasehat,

Prof.Dr.H.M. Tahir Kasnawi, SU
Promotor

Prof.Dr. H. Abu Hamid
Co-promotor

Prof. Dr.TR. Andi Lolo
Co-promotor

Ketua Program Studi
Ilmu Sosial

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof.Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU

Prof. Dr.dr. A. Razak Thaha,M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Jamaluddin Iskandar
Nomor Pokok Mahasiswa	: P0604303005
Program Studi	: Ilmu Sosial
Konsentrasi	: Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2008
Yang Menyatakan,

Jamaluddin Iskandar

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis tetap tegar dalam menghadapi berbagai masalah baik yang bersifat akademik maupun non akademik terutama dalam tahap merampungkan disertasi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi S3 untuk mendapatkan gelar Doktor.

Berbagai kendala yang penulis temui dalam penyelesaian tulisan ini, tetapi atas bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka tulisan ini dapat diselesaikan, dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada tim Promotor yang terdiri atas Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU sebagai promotor, Prof. Dr. H. Abu Hamid, dan Prof. T. R. Andi Lolo, Ph.D. sebagai ko-promotor. Ketiganya telah memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian ini berlangsung.

Ucapan terima kasih tak lupa pula disampaikan kepada Tim Penguji yang terdiri atas, Prof. Dr. H. Arifin Sallatang, Prof. Dr. H. M. Idrus Abustan, Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, MS, Prof. Dr. Dharmawan Salman, M.Si, Dr. H. Mahmud Tang, MA. dan Dr. Edward L. Polinggomang, MS. Atas saran dan keritika nnya yang sangat konstruktif mulai sejak seminar proposal penelitian , seminar hasil penelitian, Ujian tertutup, hingga pada ujian promosi Doctor .

Demikian pula penulis tak akan lupa mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, dosen, dan karyawan pada Program

Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu sejak awal mengikuti studi program S3 hingga selesai. Terkhusus kepada Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU selaku ketua program studi Ilmu Sosial S3 Pascasarjana UNHAS, yang telah bersusah payah memberikan bantuan dan bimbingan serta mencurahkan ilmunya yang tak ternilai harganya selama penulis mengikuti program Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada, Bapak, H. M. Aksa Mahmud sebagai Kuasa Ketua Umum Yayasan PT. Algazali, ayahanda K.H. Busaeri Judda Ketua BPH Yayasan PT. Algazali dan ayahanda Drs. H. Abd Rahman Idrus, M.Pd Sekretaris Yayasan PT. Algazali. Ibu, Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Makassar dan para pembantu Rektor, para Dekan, Pembantu Dekan dan Ketua Lembaga, atas bantuan dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Khusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik penghargaan yang sama disampaikan kepada Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, serta staf tata usaha dan akademik, teman-teman Dosen yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, atas bantuan dan kerja samanya yang baik selama penulis mengikuti studi.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada segenap aparat pemerintah provinsi Kalimantan

Timur, Pemerintah Kota Samarinda, dan segenap aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pemerintah Kota Palu. Demikian juga Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada, Kakanda K.H. Syayyid A. Rahim Assegaf Puang Makka, Bapak Almarhum Muflihuddin Ramling, SE atas bantuan moril dan materil yang di berikan kepada penulis semenjak awal sampai penulis menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus tercurah kepada kedua orang tua tercinta: Ayahanda Iskandar (Alm), dan Ibunda Sairah, serta tante Hj. Hasiah. Terima kasih pula kami haturkan kepada kakanda Mappiare dan Suherah, Kakanda Subhan dan Masita, Kakanda Mastura, Kakanda Dra. Nasirah dan adindaku Jumriani serta segenap Ponakanku.

Teristimewa kepada istri tercinta, Ismawati, SE. M.Si atas ketabahan , do'a, dan dukungan yang tulus di tengah kekurangan, ketidak mampuan dan keterbasan dalam menggapai harapan dan cita-cita. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, September 2008.

Jamaluddin Iskandar

ABSTRAK

JAMALUDDIN ISKANDAR, *Orang Bugis Perantau: Pola Interaksi Sosial di Kota Samarinda dan Kota Palu* (dibimbing oleh H. M. Tahir Kasnawi, H. Abu Hamid dan TR Andi Lolo).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kekayaan pola interaksi sosial orang Bugis perantau, baik sesama orang Bugis maupun dengan etnis lain, sehingga mereka dapat diterima dan surpaif di mana pun orang Bugis berada dan beraktifitas. Penelitian ini secara husus di tujukan (1) Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola interaksi sosial orang Bugis perantau di Kota Samarinda dan Palu (2) Mengkaji dan menjelaskan perilaku sosial ekonomi orang Bugis perantau di kota Samarinda dan kota Palu baik dari segi : Pemukiman, pekerjaan, dan perkawinan. (3) Mengkaji hubungan orang Bugis perantau dengan daerah asalnya.

Penelitian ini berlokasi di Kota Samarinda ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Palu ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan lokasi khusus penelitian diadakan di masing-masing kecamatan yang terdapat di Kota Samarinda dan Kota Palu dengan melihat dan mempertimbangkan situasi sosial masyarakat khususnya orang Bugis Perantau. Penentuan lokasi penelitian dan unit analisis orang Bugis perantau secara Purposiv dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan life history.

Dalam studi ini di temukan fakta bahwa orang Bugis perantau dalam menjalin interaksi sosial dengan sesama manusia berpegang pada beberapa prinsip interaksi yang sejak lama dipedomani oleh orang Bugis dimanapun dia berada, prinsip yang dimaksud antara lain: *lempu, sipakatau . getteng, warani, ada tongeng, dan siri* . Orang Bugis perantau khususnya di kota Samarinda, tampak kemampuan mereka untuk meraih posisi-posisi penting di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang politik, birokrasi, pemerintahan maupun bidang perdagangan dan ekonomi Orang Bugis di kota Palu selain bidang ekonomi dan perdagangan yang menempati posisi elit birokrat dan politik tidak sebanyak yang terjadi di kota Samarinda. Konflik antara orang Bugis perantau dengan etnis lain yang melibatkan secara terbuka kelompok etnis di kota Palu walaupun kecil volumenya akan tetapi lebih besar intensitasnya dibandingkan dengan konflik orang Bugis perantau dengan etnis lain yang melibatkan kelompok etnis secara terbuka yang terjadi di kota Samarinda.

ABSTRACT

JAMALUDDIN ISKANDAR : *The Bugis Migrants A Study On Their Social Interaction Pattern in The Cities Of Samarinda, and Palu (Guided by H.M.Tahir Kasnawi, H.Abu Hamid and TR. Andi Lolo).*

This research purposes to discover social interaction pattern whether among similar tribes or others that could be adaptable to survive and do activities in their place where they live. This research particularly bring forward to the following items : (1) Describing the social interaction patterns in Samarinda and Palu (2) Analyzing the Buginese behavior forwards economical and social performance on the residence, (living place), jobs and marriage. (3) Analyzing the Buginese wanderer related to their home village where they are from.

The field of research located in Samarinda, the capital city of East Kalimantan and Palu, the capital city of Central Sulawesi while the special research is held in sub – region or regency through the consideration of social-condition of the community. The ways are using observation in collecting data, interview, live history as well as some other references documentarily.

For this study, it is found that the Buginese migrants in social interaction, emphasize to their own revealed-principles that we called: lempu (rightness), Sipakatau (Respectful inter- humanity), getteng (strongly hold for notion), warani (braveness or encouragement), and siri (ethical shame mess). In collaboration they have one similar loyalty to participate helping their next-doors in condolence, troublesness-situation such as social conflict among them or others although in the small gape or conflict in Palu but it is having a big intensity compared with the ethnic-group that happened in Samarinda.

DAFTAR ISI

	Hal
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB. I PENDAHULUAN	
A.	L
atar Belakang Masalah	1
B.	R
umusan Masalah	10
C.	T
ujuan Penelitian	11
D.	K
egunaan Hasil Penelitian	11
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGAKA KONSEPTUAL	
A.	M
asyarakat	14
B.	M
obilitas Penduduk	25
C.	K
onsef Interaksi Sosial	41
D.	P
ertukaran Sosial	60
E.	M
odel Peran	64
F.	H
asil Studi Terdahulu	66

G.....	K
erangka Konseptual	71

BAB. III. METODE PENELITIAN

A.....	P
Pendekatan Dan Desain Penelitian	74
B.....	T
Metode dan Prosedur Penelitian	76
C.....	D
Definisi Operasional	84

BAB. IV. SETTING LOKASI

A.....	K
Kota Samarinda	91
B.....	K
Kota Palu	106

BAB. V. SELAYANG PANDANG TENTANG ORANG BUGIS

A.....	A
Aspek Usul Orang Bugis	121
B.....	B
Bahasa dan Aksara Bugis	139
C.....	P
Stratifikasi Sosial Orang Bugis	143
D.....	F
Faktor Penyebab Orang Bugis Merantau	148

BAB. VI. PERILAKU SOSIAL EKONOMI ORANG BUGIS PERANTAU

A.....	P
Persepsi	157
B.....	P
Perilaku	162
C.....	S
Sistem Perkawinan	178

BAB. VII. POLA INTERAKSI SOSIAL ORANG BUGIS PERANTAU

A.	P
Prinsip Interaksi Sosial Orang Bugis Perantau	193
B.	P
Model Komunikasi orang Bugis Perantau	199
C.	P
Model Kerja Sama orang Bugis Perantau	206
D.	K
Konflik Orang Bugis Perantau	211
E.	A
Ekomodasi	218
F.	I
Faktor Interaksi Interpersonal.....	226

BAB. VIII. INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

A.	D
Dinamika Interaksi Sosial Antar Etnis	238
B. Fenomena Migrasi dalam Perspektif Perantau Bugis	265
C. Modernisasi Etnisitas dan Konflik Antar Etnis	283
D. Diferensiasi Dalam Pluralitas Masyarakat Multi-Etnis	304

BAB. IX. P E N U T U P

A.	K
kesimpulan	321
B.	S
Saran- Saran	323

DAFTAR PUSTAKA	327
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel :	Hal
1. Penduduk Kota Samarinda menurut Kecamatan dan Suku Bangsa	95

2. Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan dan Suku Bangsa	110
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

Hal

1. Skema Kerangka Pikir	73
2. Masjid Siratal Mustaqim di bangun 1881-1891 M, Salah satu dari empat tiang Masjid di sumbangkan oleh orang Bugis.	104
3. Makam La Mohan Dg Mangkona. Wafat tahun 1746 M. Pendiri kota Samarinda.....	105
4. Saoraja (Rumah Adat Kerajaan Kaili) dibangun Tahun 1892 M.....	117
5. Rumah tempat tinggal orang Bugis sampai saat ini masi berdiri kokoh di Samarinda Seberang...	159
6. Perempuan Orang Bugis pengrajin Tenun sarun dan kain Samarinda.....	166
7. Suasana Penjual Emas (orang Bugis) Pasar Pagi Kota Samarinda.....	169
8. Suasana Pelabuhan Samarinda menjelang kapal berangkat ke pelabuhan Pare-Pare. Salah satu kapal yang pemiliknya orang Bugis.....	172

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor:	Hal
1. Peta Kota Samarinda	339
2. Logo Kota Samarinda	340
3. Peta Kota Palu.....	345
4. Logo Kota Palu.....	346
5. Rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	352
6. Rekomendasi Pemerintah Provinsi Kalimantan timur.....	353
7. Rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.....	354
8. Rekomendasi Pemerintah Kota Samarinda.....	355

9. Rekomendasi Pemerintah Kota Palu.....	356
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobilitas perpindahan, orang Bugis untuk menetap di daerah tujuan menjadi lebih besar sejak Sultan Hasanuddin , Raja Gowa, ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1669. Demikian juga situasi daerah Sulawesi Selatan yang tidak aman sesudah kemerdekaan , terutama pada tahun 1950-1965 karena pemberontakan, menyebabkan banyak orang Bugis membawa keluarga mereka dan membentuk pemukiman-pemukiman yang tersebar di berbagai kawasan Nusantara mulai dari Sabang sampai Meroke.

Masyarakat Indonesia berkembang secara intens ke arah perubahan. Perubahan yang menyangkut berbagai macam segi kehidupan yang dimulai dari cita-cita sosial berlandaskan Bhihinneka Tunggal Ika, wawasan tentang dunia dan masyarakat, cara mengatur kehidupan bahkan sampai kepada gambaran tentang manusia Indonesia secara heterogen yang dicita-citakan dan mungkin inilah salah satu dari sekian transportasi kehidupan dan masyarakat yang besar dan lengkap dewasa ini.

Perubahan yang terjadi pada segi kehidupan manusia baik di bidang politik, dan sosial budaya dapat mengakibatkan keresahan,

kegoncangan, pergolakan dan ketidak pastian sehingga menuntut penanganan serius dari pemerintah. Setiap perubahan selalu membawa konsekuensi-konsekuensi yang menyangkut semua segi kehidupan karena itu, perlu dikenal dan dipertimbangkan dalam suatu perencanaan demi keseimbangan dan kesinambungan masyarakat sebagai kesatuan sistem.

Penelitian tentang fenomena masyarakat yang melakukan perantauan di Indonesia, terutama dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya, penting dilakukan. Melihat kenyataan melimpah ruahnya penduduk Indonesia. Keyfitz dan Nitisastro (1964) menyatakan bahwa hal itu bukanlah ancaman, bahkan memberi kesempatan tumbuhnya suatu bangsa yang lebih besar dan makmur. Tetapi jika kesempatan ini tidak digunakan, dengan segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat, tegas dan cepat, maka kesempatan emas itu dapat membawa akibat-akibat yang tidak diharapkan. Bahkan tidak mungkin kelak akan jauh lebih sulit menghadapinya.

Akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah padat penduduknya, khususnya di daerah pertanian dengan luas lahan yang tetap, kesempatan kerja di bidang pertanian semakin lama semakin berkurang. Selain itu, kondisi daerah pertanian dan pedesaan yang belum memungkinkan pertumbuhan usaha di bidang lain, misalnya di bidang industri, menyebabkan kesempatan kerja selain bidang pertanian juga sangat berkurang. Pembangunan prasarana perhubungan, meningkatkan

integrasi antar daerah dan mengurangi rintangan terhadap masyarakat yang ingin melakukan perantauan dengan ongkos lebih murah dan cepat.

Bintarto (1979) mengemukakan tiga masalah utama kependudukan di Indonesia: a) pemerataan penyebaran penduduk agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersebar, b) memperbaiki lingkungan hidup dari wilayah yang sudah lama ditempati dan padat penduduknya, dan c) pemerataan serta perluasan kesempatan kerja.

Indonesia sejak dahulu, sebelum Perang Dunia II pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah melaksanakan program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah di luar Pulau Jawa. Untuk memecahkan persoalan tekanan penduduk, pemerintah mengadakan satu program penyebaran penduduk yang dikenal dengan program kolonisasi. Disamping perpindahan penduduk yang disponsori oleh pemerintah juga terdapat perpindahan penduduk atas keinginan dan biaya sendiri.

Orang Bugis termasuk kelompok yang banyak melakukan mobilitas gerakan perpindahan penduduk atas keinginan dan biaya sendiri, mempunyai implikasi praktis bagi perkembangan sosial ekonomi, baik daerah asal maupun daerah tujuan, karena yang merantau adalah orang yang memiliki potensi ekonomi dan potensi kerja yang lebih besar, meninggalkan daerahnya melakukan perantauan mencari arena tantangan yang lebih membukakan banyak kemungkinan.

Merantau lebih kompleks tampil apabila orang juga memandangnya sebagai ekspresi mobilitas sosial. Seperti migrasi pada

umumnya, merantau bukanlah tingkah laku yang acak sipatnya yang hanya dimiliki oleh individu tertentu atau bahkan strata sosial tertentu saja. Merantau merupakan bentuk tingkah laku sosial yang sifatnya kolektif dan berulang, yang dapat diramalkan dan melembaga. Selaku bahagian dari sistem sosial merantau umumnya timbul dari dalam sekalipun sebahagian dirangsang dari luar, dan sebab itu sebahagian dari motivasinya harus dicari dalam sistem sosial itu sendiri. Merantau merupakan kenyataan sosial yang dapat dianalisis dan dipelajari dengan teori sosiologis.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah tujuan utama perantau dari daerah Sulawesi selatan, terutama bagi orang Bugis. Meski ada diantara mereka telah puluhan tahun mendiami daerah tersebut dan ada di antara mereka belum pernah kembali dan menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan namun masih tetap teguh mempertahankan budaya orang Bugis dan sebahagian besar dari mereka tetap menjaga komunikasi serta pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan.

Tujuan para perantau tersebut selain didorong oleh semangat untuk mencari pengalaman hidup, juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, perspektif politik, dan keamanan. Kepulangan mereka kembali ke kampung halamannya untuk melepas rindu sambil menyimpan kekayaan yang telah mereka dapatkan. Selain itu, mereka pun kembali ke daerah perantauannya untuk mencari

nafkah lagi. Fenomena tersebut ternyata berdampak pada berubahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mengangkat status sosial mereka, bahkan dapat merubah alam pikiran dan orientasi sosial mereka. Berdasarkan realitas tersebut, berbagai variabel menjadi kunci untuk menemukan aspek-aspek yang melandasi persoalan tersebut dapat dipermasalahkan.

Merantau sebagai fenomena masyarakat Bugis terutama merantau di perkotaan dapat dijelaskan sebab-sebabnya dengan teori *Push-Pull* Lee, (1976) yaitu daya tarik (*pull*) kota dan daya dorong (*push*) desa. Menurut Lee, beberapa daya tarik kota (*pull*) dapat diidentifikasi, seperti fasilitas pendidikan yang lebih baik dan bermutu, lapangan pekerjaan yang luas, keamanan yang lebih terjamin, sarana hiburan dan rekreasi yang banyak dan beragam dan lain-lain. Sementara faktor pendorong di desa di antaranya adalah karena adanya kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, fasilitas pendidikan yang terbatas, sarana hiburan dan rekreasi yang kurang, keamanan yang seringkali kurang terjamin dan berbagai sebab lainnya. Kedua faktor tersebut secara sendiri-sendiri akan terintegrasi dan menyebabkan banyak penduduk desa berpindah ke kota, termasuk ke Kota Samarinda dan Palu, yang dianggap paling menjanjikan untuk memperbaiki nasib.

Menurut Todaro (1996), faktor yang paling banyak disoroti sebagai penyebab migran desa-kota adalah kemiskinan di desa, yang mendorong

mereka untuk bermigrasi ke kota dengan harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Hugo (1978), mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi gerak penduduk. Faktor ekonomi ini tercermin dari adanya tekanan-tekanan penduduk di pedesaan dan adanya kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak di tempat lain. Selain faktor ekonomi terdapat faktor lain yang mempengaruhi yakni *; derajat keragu-raguan yang bertalian dengan perpindahan, hubungan normative masyarakat desa dan karakteristik perorangan migrant sendiri.*

Lineton (1975), menyatakan bahwa *Passompe* orang Bugis bukan hanya sekedar meninggalkan *Tana Ugi* , karena alasan ketidak puasan akan sistem sosial, kultur dan politik pada waktu itu tetapi juga karena alasan ekonomi, yaitu ingin mengembangkan perdagangan laut. Dengan perahu *pinisi* , mereka memanfaatkan angin muson timur menuju ke arah Selat Malaka. Mereka kembali setelah enam bulan kemudian dengan memanfaatkan angin muson barat .

Kehadiran penduduk yang berasal dari daerah dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda mengakibatkan masyarakat di Kota Samarinda dan Palu sangat heterogen, baik dilihat dari aspek agama, suku bangsa, dan sosial budayanya.

Orang Bugis perantau di Kota Samarinda dan Palu yang pada umumnya diperkuat oleh dorongan tekanan kehidupan yang berat di daerah asalnya. Di kalangan mereka, merantau dimungkinkan karena

adanya unsur solidaritas yang kuat. Unsur ini semakin menonjol bila para perantau itu tidak punya bekal cukup untuk segera memulai hidup baru di rantau. Merantau ke daerah lain, lebih-lebih melampaui daerah etnis sendiri, memerlukan modal keberanian, keuletan, dan uang. Setiap usaha baru memerlukan modal cadangan. Modal cadangan para perantau ini adalah solidaritas kelompok. Dengan berbekal solidaritas kelompok yang kuat, kesulitan hidup di rantau dapat diatasi bersama-sama. Tanpa adanya unsur solidaritas kelompok ini, migrasi swakarsa, lebih-lebih secara besar (berkelompok), tidak akan terjadi, karena akan timbul keraguan dan ketidakpastian dalam menghadapi resiko dirantau. Dengan solidaritas kelompok ini, mereka secara spontan membantu anggota lain yang mengalami kesulitan. Maka tiap anggota yang mengalami kesulitan, mempunyai kepastian harapan mendapatkan bantuan spontan dari anggota lain.

Solidaritas sosial yang kuat di antara perantau, di samping mempunyai pengaruh positif terhadap hidup mereka di rantau, juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya (Ismani, 1978). Di sinilah letak seni sosialnya. Mereka mesti menjaga keseimbangan antara pengaruh solidaritas yang positif dengan pengaruh negatif, sehingga keselarasan hubungan sosial dapat diwujudkan. Namun demikian, kadang-kadang timbul juga letupan di sana-sini yang membawa korban. Naim (1984).

Situasi dan kondisi demikian tetap melekat pada diri perantau, bahkan semakin berkembang di rantau. Untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan di rantau, tampaknya unsur solidaritas kelompok ini semakin diperlukan. Solidaritas mekanis akan timbul dengan adanya kelompok-kelompok profesi yang mengerjakan pekerjaan serupa Ismani, (1978).

Manusia pada hakekatnya mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama. Bahkan semenjak lahir sudah memiliki keinginan untuk hidup berkawan, sehingga lazim disebut sebagai makhluk sosial. Secara sosial dapat dijelaskan bahwa manusia sangat memerlukan kehadiran manusia lain, terutama ketika akan melakukan aktifitas. Dengan demikian hubungan sosial diantara sesama manusia pada kesimpulannya seyogyanya akan melahirkan keselarasan dalam menjalani suatu kehidupan.

Manusia pada saat berusaha mencari keselarasan guna penyesuaian dengan orang lain, maka diperlukan nilai-nilai sosial yang sudah disepakati bersama. Penyesuaian akan nilai-nilai sosial oleh setiap manusia merupakan konsekuensi dari kondisi masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, nilai itu akan mewarnai sikap saling membantu, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Aktifitas demikian menggambarkan suatu bentuk interaksi sosial yang didalamnya terdapat hubungan sosial yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, baik terhadap individu ataupun kelompok, hubungan sosial demikian

cenderung berjalan secara dinamis. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan melahirkan suatu proses sosial dan saling pengaruh mempengaruhi yang berwujud dalam pikiran dan tindakan.

Interaksi sosial antara orang Bugis perantau dengan individu dan kelompok yang terjadi di Kota Samarinda Kalimantan Timur dan Palu Sulawesi Tengah, selain memiliki kesamaan profesi yang merujuk pada suatu bentuk kerja sama atau juga berupa persaingan juga diwarnai oleh perbedaan sosial budaya. Secara horizontal menunjukkan bahwa pada masyarakat terdapat kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat dan perbedaan kedaerahan. Meskipun berbeda etnik maupun agama dapat saja dimotivasi oleh kepentingan menjadi satu karena menyesuaikan diri dengan bentuk kerja yang disepakati.

Dewasa ini kehidupan di Kota Samarinda dan Palu menjadi lebih kompleks bukan saja didasarkan atas etnis, pekerjaan dan status sosial ekonomi tetapi juga didasarkan atas besar kecilnya akses ekonomi bagi masyarakat perkotaan. Dalam kompleksnya kehidupan sosial tersebut, akan terjadi interaksi hubungan sosial individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Dalam lingkungan sosial mereka hidup, terjadi hubungan sosial dengan warga lainnya, dan dengan cepat akan terjadi interaksi baik komunikasi, partisipasi di antara mereka, dan bisa jadi juga kompetisi dan menjurus pada konflik. Dari

permasalahan sosial di atas sangat menarik bila ditinjau dari segi sosiologis.

Interaksi sosial yang dilakukan orang Bugis di Kota Samarinda dan Palu menarik untuk dianalisis dari berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha menciptakan solidaritas dan integrasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai Pola interaksi sosial orang Bugis perantau dengan masyarakat Kota Samarinda dan Kota Palu. Tulisan ini menyoroti perilaku Pola interaksi yang mewarnai kehidupan orang Bugis perantau sebagai warga dari suatu komunitas, keterlibatan mereka yang berbentuk hubungan kerja umumnya didasari ikatan kekerabatan, dan persahabatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang menjadi focus dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana Perilaku Sosial Ekonomi orang Bugis perantau di Kota Samarinda dan Palu
- b. Bagaimana pola Interaksi sosial Orang Bugis di Kota Samarinda dan Palu
- c. Bagaimana pola hubungan orang Bugis perantau dengan daerah asalnya.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kekayaan pola interaksi sosial orang Bugis perantau, baik sesama orang Bugis maupun dengan etnis lain, sehingga mereka dapat diterima dan surfaif di mana pun orang Bugis berada dan beraktifitas. Karena itu penelitian ini di tujukan untuk:

- a. Mengkaji dan menjelaskan perilaku sosial ekonomi orang Bugis di kota Samarinda dan kota Palu baik dari segi :
Pemukiman, pekerjaan, dan perkawinan.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola interaksi sosial orang Bugis perantau di Kota Samarinda dan Palu
- c. Mengkaji hubungan orang Bugis perantau dengan daerah asalnya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berupaya menemukan fakta emperis, tentang fenomena masyarakat perantau, hususnya orang Bugis perantau di kota Samarinda dan kota Palu, demikian juga sebagai pengembangan dan meningkatkan

pemahaman ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi kemasyarakatan dan sebagai bahan informasi/rekomendasi kemungkinan penelitian lanjutan, terutama bagi penelitian yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat perantau.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai dasar pertimbangan bahan masukan bagi Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan berkaitan dengan pola interaksi masyarakat plural dalam menciptakan integrasi sosial masyarakat dalam mewujudkan masyarakat damai dan sejahtera.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya memahami fenomena masyarakat perantau serta pola interaksi masyarakat tidak terlepas pada kajian sosiologis. Menurut Broom dkk (1981) menyatakan sosiologi menganalisa kehidupan sosial pada tiga tingkatan: antar pribadi, kelompok, dan kemasyarakatan. Hubungan antar pribadi adalah hubungan sosial antara dua orang atau lebih, seperti antar teman, pemimpin-pengikut, atau antar tetangga. Antar pribadi artinya “antarorang-orang”, tetapi tidak berarti bahwa hubungan itu harus dekat atau ramah tamah. Mereka mungkin bersahabat atau bermusuhan; dekat atau jauh; rapat atau renggang.

Analisa Broom berhubungan dengan kelompok dan hubungan antar kelompok. Kelompok mempunyai arti umum, dapat berupa satu keluarga sampai sebuah bangsa. Dua orang membentuk satu kelompok jika mereka kawan atau sekutu; mereka juga diikat oleh suatu kepentingan yang sama; atau mereka saling tergantung dan terpisah dari orang lain karena hubungan mereka. Analisis berhubungan dengan seluruh kesatuan hidup atau masyarakat. Suatu masyarakat ditandai pola-pola kokoh dan nyata dari suatu organisasi sosial. Pola-pola ini disebut suatu keteraturan sosial.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa dua orang atau lebih yang sepaham, dapat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan, Ogburn (1958) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok terbentuk apabila dua orang atau lebih saling berhubungan. Inti kehidupan kelompok adalah saling merangsang dan menanggapi atau berkomunikasi. Komunikasi ini terdiri dari simbol-simbol yang dimengerti bersama, seperti ekspresi muka, isyarat tangan, dan kata-kata, kemudian suatu kelompok akan menetap di daerah yang dipandang paling memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

A. Masyarakat

Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Auguste Comte dalam Abdulsyani, (1992), menyatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut T. Parson dalam Susanto, (1983), bahwa masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Sementara Sukanto (2001)

melihat Community sebagai “masyarakat setempat” istilah mana menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa sekelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Sebagai suatu perumpamaan, kebutuhan seseorang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia bersama-sama rekan lain yang sesuku. Demikian, kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat adalah adanya *sosial relationships* antara anggota suatu kelompok. Demikian mengambil pokok – pokok uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di mana para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial tertentu. Edward Shils dalam Susanto, (1983), juga menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibagi dalam tiga komponen yaitu pengaturan diri, reproduksi sendiri, dan penciptaan diri.

Marion Levy dalam susanto, (1983), mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu: (1) Kemampuan bertahan melebihi masa hidup

seorang individu (2) Rekrutmen seluruh atau bagian anggota melalui reproduksi, (3) Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama. Dan (4) Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. Lebih lanjut Inkeles dalam Susanto, (1993), mengemukakan bahwa suatu kelompok hanya dapat kita namakan masyarakat bila kelompok tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut.

Selanjutnya pendapat Krech Cruchfield dan Ballachey dalam Sumaatmadja, (1998), mengemukakan defenisi masyarakat sebagai suatu kelompok perilaku yang terorganisir yang aktivitas masyarakatnya saling mempengaruhi melalui seperangkat kepercayaan umum, sikap dan bentuk tindakan.

Tonnies (1954) menyebut adanya bentuk hubungan kemasyarakatan yang mempunyai ikatan sosial yaitu paguyuban. Paguyuban dibedakan ke dalam: (1) panguyuban karena ikatan tunggal keturunan, (2) panguyuban karena persamaan tempat tinggal, dan (3) paguyuban karena adanya pemikiran dan perasaan yang sama. Ketiga jenis panguyuban ini saling berhubungan dengan erat, antara satu dengan yang lainnya, panguyuban yang berdasarkan ikatan keturunan, sehingga solidaritas yang muncul disebabkan oleh kekuatan yang wajar yaitu ikatan sedarah.

Konsep masyarakat ini lebih dirincikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan yang terungkap pada interaksi manusianya, dalam hal ini interaksi dan tindakan itu tentu saja interaksi serta tindakan sosial. Dari berbagai konsep tentang masyarakat yang dikemukakan di atas, tidak terdapat perbedaan ungkapan yang mendasar, justru yang terlihat adalah mengenai persamaannya, masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas yang melakukan antara hubungan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, sedikit banyak berlangsung dalam waktu yang lama atau melebihi masa hidup seorang individu, dan dilaksanakan berdasarkan perhatian dan tujuan bersama serta melakukan jalinan secara berkesinambungan dan sebagai bentuk sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Emile Durkheim, menjelaskan adanya hubungan antara solidaritas dengan ikatan sosial. Solidaritas mekanik didasarkan pada homogenitas individu. Ikatan yang menyatukan mereka adalah kesepakatan yang kuat dari pendapat umum, berdasarkan pada homogenitas mental dan moral para individu. Kurangnya pengakuan rasa individualitas dalam suatu kelompok, memunculkan patriotisme lokal dan kesukuan. Menyimak berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam diri individu suatu kelompok, dapat muncul beberapa tingkatan solidaritas, yaitu: (1) solidaritas sedarah atau keluarga; (2) solidaritas kedaerahan; (3)

solidaritas kesukuan; (4) solidaritas kebangsaan atau nasional. Adapun solidaritas keluarga, yang dapat dibedakan ke dalam: solidaritas keluarga inti; solidaritas keluarga luas; dan solidaritas keluarga atau kerabat yang lebih luas.

Jika diperhatikan terlihat bahwa kelompok-kelompok tersebut mempunyai ikatan yang bersifat universal, yakni kepentingan. Kepentingan yang sama akan menimbulkan ikatan dalam suatu kelompok yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa solidaritas di antara sesama untuk mempertahankan kepentingan tersebut. Jadi kepentingan akan menentukan sikap, seperti di kemukakan oleh Sosrodiharjo (1974) bahwa sikap orang sangat bergantung kepada kepentingan. Dengan kata lain, sikap adalah fungsi dari kepentingan. Maclver dan Page (1949) menyebut, "kelakuan sosial kita adalah ekspresi sikap-sikap dan kepentingan-kepentingan kita.

Salim Agus (2002), memberikan pengertian penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam suatu batas wilayah tertentu dan mempunyai ciri perilaku demografis sebagai hasil interaksi, unsur utamanya yaitu fertilitas, mortalitas, morbiditas dan mobilitas. Pengertian lain masyarakat setempat dapat disamakan sebagai komunitas, yang menunjukkan warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa.

Horton dan Hunt dalam Sumaatmaja (1998), memberikan konsep komunitas sebagai suatu pengelompokan setempat (lokal) yang menjadi wadah penyelenggaraan kegiatan hidup warganya secara penuh. Dengan

demikian pengertian komunitas ini lebih menekankan kepada kelompok manusia yang jumlahnya lebih terbatas, menempati kawasan tertentu dan aktivitas warganya lebih menyeluruh.

Anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok yang besar maupun kecil dan hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi dinamakan masyarakat setempat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang utama, seseorang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia tidak hidup bersama-sama dengan rekan lainnya, maka kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah hubungan sosial antara anggota suatu kelompok.

Berdasarkan pokok-pokok uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya jika dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

Secara keseluruhan masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk mengadakan hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Di samping itu, pada masyarakat setempat terdapat adanya unsur-unsur perasaan komuniti antara lain: (1) seperasaan. Unsur seperasaan akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut. Sehingga

kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai kelompok kami, dan sebaliknya. Perasaan semacam ini terutama muncul apabila orang-orang tersebut mempunyai kepentingan yang sama di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lebih menekankan pada perasaan kesetiakawanan dengan orang lain. Pada unsur seperasaan, kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan kelompok sehingga masing-masing merasakan bahwa kelompoknya sebagai struktur sosial masyarakat, (2) sepenanggungan. Setiap individu sadar bahwa akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan, sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri, (3) saling memerlukan individu. Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis.

Durkheim (1964), menyatakan beberapa pandangan dasar yang mencerminkan pokok-pokok pikiran aliran organisme, antara lain: (1), masyarakat tidak dapat berdiri sendiri yang dapat dibedakan dari bagian-bagiannya, tetapi harus dilihat sebagai suatu keseluruhan secara utuh; (2) sebagian suatu sistem dianggap memenuhi fungsi-fungsi pokok, maupun kebutuhan sistem secara keseluruhan; (3) kebutuhan pokok suatu sistem sosial harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya keadaan abnormal atau patologis; (4) setiap sistem mempunyai pokok-pokok keserasian tertentu yang segala sesuatunya akan berfungsi secara normal dan baik.

Durkheim (1964), juga mengungkapkan bahwa simbol-simbol itu harus menyatukan situasi dan orientasi sub populasi, sub budaya, sub kategori dan sub kelompok yang berbeda. Kemudian proses nilai itu terlalu cepat waktunya sebelum sub-sub budaya, norma dan aspek yang memaksa serta saling ketergantungan di antara pelaku dan sub populasi yang berbeda. Konsekuensinya adalah terjadi *anomi*. Menurut teori fungsional sangat penting untuk mengadakan konsensus dari semua simbol-simbol. Bila penyatuan simbol-simbol tidak tercapai, maka akan terjadi disintegrasi.

Menurut Durkheim, ikatan solidaritas mekanisme yang jumpai pada masyarakat yang masih sederhana, laksana kohesi antara benda-benda mati, sedangkan ikatan solidaritas organik yang dijumpai pada masyarakat yang kompleks, laksana kohesi antara organ hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam usaha pengintegrasian harus ada organisasi-organisasi profesi. Meskipun hal ini kurang mendapat tanggapan kaum fungsionalis, namun kenyataan membuktikan bahwa banyak orang menjadi anggota salah satu organisasi, dan dengan melalui organisasi itu individu maupun kelompok diikat dengan keseluruhan masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur besar kecilnya pengaruh kesadaran kolektif, Durkheim menggunakan tata hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai indeks. Masyarakat, di mana solidaritas menonjol, dapat dikenal dari banyaknya hukum pidana. Setiap

pelanggaran sosial yang dialami oleh masyarakat sebagai penghinaan sebagai kesadaran umum, yang perlu dibalas, (Soekanto, 1990).

Dewasa ini pengaruh kesadaran kolektif atas individu berkurang dalam masyarakat pluralitas. Jika semua orang menjadi sama dan diikat oleh solidaritas mekanisme, maka setiap tindakan yang menyimpang dari pola umum akan menimbulkan reaksi negatif masyarakat. Orang tidak senang melihat bahwa di antara mereka ada yang memamerkan posisi. Lebih-lebih setiap pelanggaran hukum langsung dirasa oleh masyarakat sebagai ancaman terhadap eksistensinya, dan dibalas dengan hukuman berat (Soekanto, 1990).

Bertolak dari pemikiran Durkheim di atas, dapat dipahami bahwa struktur sosial suatu masyarakat mencerminkan solidaritas mekanik atau organik, tingkat integrasi sosial yang dipertahankan dalam bentuk minim tidak pernah berlangsung secara otomatis. Dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik, solidaritas sosial terancam oleh kemungkinan perpecahan kelompok-kelompok kecil yang secara fungsional bersifat otonom. Dengan demikian, hukuman terhadap penyimpangan merupakan suatu pencegahan terhadap penyimpangan yang akan datang, dan yang terpenting memberikan kesempatan bagi komunitas itu, untuk memperkuat kembali tuntutan normatif dari kesadaran kolektif dan mempertegas batas perilaku yang diterima dan ditolak masyarakat. Jelas penegasan ini merupakan fungsi sosial yang

paling penting dalam mempertahankan komitmen terhadap kesadaran kolektif yang menjadi dasar keteraturan sosial dan masyarakat.

Parsons membagi permasalahan fungsi struktur, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Perpaduan masyarakat disebabkan oleh: 1) adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, 2) yang dikembangkan menjadi norma sosial, dan 3) dijadikan oleh individu sebagai motivasi (Layendecker 1991).

Selanjutnya, Marton menunjuk tiga postulat yang berlaku. *Postulat pertama*, adalah “kesatuan fungsional masyarakat” yang dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial berkerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Marton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional bagi suatu kelompok, tetapi disfungsional bagi kelompok lain. *Postulat kedua*, adalah “fungsionalisme universal” yang melihat bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku mempunyai fungsi-fungsi positif. *Postulat ketiga*, adalah “kehausan” (indispensability) yaitu setiap tipe peradaban, kebiasaan ide-ide obyek materi dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan, (Paloma, 1998).

Dahrendorf (1986), adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus), dan karena

itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama tekanan itu. Menurut fungsionalis, sistem sosial dapat dipersatukan oleh kerjasama sukarela atau konsensus bersama atau oleh keduanya. Menurut teoritis konflik, masyarakat dipersatukan oleh “ketidak bebasan yang dipaksakan”. Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dahrendorf, memandang bahwa pentingnya pemikiran Lewis Coser, yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo (Veeger, 1993).

Pendekatan fungsionalisme dibangun dengan landasan fungsi dari struktur sosial, dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut: (a) masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang paling mendasar, yaitu keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; (b) keinginan tersebut, dapat diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha mencapai tujuannya, yang pada gilirannya meningkatkan kompleksitas struktur masyarakat dimaksud; (c) struktur masyarakat dibedakan sesuai fungsinya yang bentuknya oleh berbagai elemen untuk mempertahankan kelangsungan hidup, (d) analisis yang paling berdaya guna untuk memberikan definisi terhadap segala kebutuhan masyarakat utama dan elemen-elemen dan strukturnya adalah analisis sistem sosial, (e) total sistem sosial adalah suatu masyarakat,

baik organisasi maupun individu memiliki hubungan dan struktur dari sistem tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan, (Nasikun, 2000).

B. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk terjadi tak lepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Suhono (1978), “kebutuhan manusia pada prinsipnya dibedakan atas kebutuhan biotis (makan, sandang, papan, pengembangan jenis); kebutuhan sosiologis (pergaulan, persaudaraan, kerja sama, kedudukan); dan kebutuhan psikologis (rasa aman, ketenangan, kebahagiaan, dinamika)”.

Sudah pasti kehidupan yang aman adalah kebutuhan dasar manusia. Apabila manusia terancam, baik semuanya atau sebagian, maka manusia akan berjuang untuk meniadakan ancaman tersebut dengan berbagai cara. Tatkala ancaman tersebut berhasil diatasi, anggota-anggota masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha dan mobilitas, akan meninggalkan tempat semula untuk mencari tempat baru yang dianggapnya lebih baik. Inilah yang kita sebut migrasi. Migrasi dapat juga terjadi, apabila kelompok yang bersangkutan menganggap apa yang mereka miliki kurang atau tidak lagi memberikan kepuasan; akibat kebutuhan yang meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sejak dulu sampai sekarang, migrasi menghiasi lembaran sejarah umat manusia. Sementara Naim dalam Andi Lolo (1986). Mengungkapkan bahwa,

migrasi atau merantau perpindahan penduduk dari dua daerah yang berlainan dan karakteristik yang berlainan pula.

Sedangkan bagi orang Bugis migrasi atau merantau biasa disebut "Sompe atau Pasompe". Selanjutnya Abu Hamid (2004) mengungkapkan bahwa: kata "Pasompe" berasal dari bahasa Bugis yang berarti orang yang berlayar. Berasal dari kata "Sompe" yaitu layar dan mendapat awalan "Pa" bermakna pelaku dari orang yang melakukan pekerjaan berlayar. Jika dilihat dari segi istilah, pasompe bisa berarti pelayar, tetapi tidak semua pelayar dapat dikategorikan sebagai pasompe dari segi maknanya.

Orang yang menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian sedapat mungkin menggunakan layar sebagai tenaga pendorong. Tetapi tidak semua itu dapat disebut sebagai pasompe. Jadi kata passompe mengandung makna, pelaut atau pedagang yang berlayar dari pulau ke pulau atau dari satu negeri ke negeri lainnya. Sementara sebagian ahli mengatakan bahwa, pasompe bermakna pengembara atau perantau ke negeri orang, yang dihubungkan dengan kegiatan migrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orang bugis itu mempunyai budaya migrasi karena ketangkasannya berlayar. (Abu Hamid 2004).

Lee (1976) menyatakan: "Migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara parmanen; tidak ada pembatasan, baik pada jarak maupun sifatnya. Yaitu tidak dibedakan antara perpindahan di dalam atau di luar negeri, serta apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa".

Sedangkan Andi Lolo (1986) menyatakan bahwa Migrasi adalah proses perubahan yang terjadi bagi orang dan masyarakat yang meninggalkan tempat tinggal semula ke tempat tinggal yang baru, mengalami perubahan yang nyata yang mempengaruhi perilaku sosial, ekonomi, psikologi dan bahkan ideology dalam lingkungan mereka.

Selanjutnya Abustan (1989) mengungkapkan bahwa migrasi selalu melibatkan pengertian perpindahan penduduk dari tempat yang satu ketempat yang lain. Dimensi ruang ini dapat berupa unit-unit adminitrasi dukuh, desa, kabupaten, kota atau propensi ataukah unit-unit geokrafis yaitu daerah pegunungan, pantai atau berdasakan blok sensus. Adapun menurut deminsi waktu gerak perpindahan penduduk beragam pulah, dari hanya beberapa jam sampai puluhan tahun. Dalam kepustakaan sering disebut bahwa faktor yang menyebabkan manusia bermigrasi adalah faktor-faktor pendorong yang berada di tempat asal dan faktor penarik yang ada di tempat tujuan.

Sehubungan dengan itu Nelson (1950) menyatakan, beberapa penulis telah mencoba mengklasifikasikan faktor-faktor dalam migrasi menjadi dua bagian pokok: pertama, yang cenderung pada pendorong dan yang ke dua yang cenderung ke faktor penarik. Faktor-faktor pendorong, secara jelas bekerja di daerah asal. Walaupun klasifikasi ini berguna namun harus dimengerti benar bahwa masing-masing faktor-faktor jarang bekerja secara bebas dari yang lainnya.

Faktor yang memengaruhi terjadinya migrasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok; (1) Pendorong, berkaitan kondisi buruk tanah air yang memaksa orang meninggalkan tanah airnya. (2) Penarik, adalah adanya hal-hal yang menarik di negara yang didatangi, misalnya kesempatan ekonomi, cuaca, dan tipe pemerintahan. (3) Sarana, berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, dan ada atau tidak adanya hambatan untuk mengadakan perpindahan tersebut. Selain faktor tersebut yang perlu dipahami bahwa perpindahan penduduk itu sebuah fenomena yang sudah ada sejak lama dalam sejarah kehidupan manusia. (Andi Lolo 1986)

Sebelumnya Nelson (1950) mengutarakan, para ahli sosiologi tertarik pada migrasi lantaran alasan-alasan berikut: (1) migrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik dalam sistem sosial dan ekonomi; (2) migrasi adalah alat perbaikan terhadap ketidakseimbangan antara penduduk dengan sumber-sumber alam; (3) dengan terganggunya komposisi umur dan kelamin dari suatu lingkaran khusus penduduk, hal itu memengaruhi kecepatan perkawinan; (4) migrasi memecahkan ikatan-ikatan sosial dan lembaga-lembaga dari individu, karenanya akan memengaruhi gereja, sekolah, lembaga-lembaga dan cara-cara reaksi sosial; (5) migrasi memengaruhi sistem ekonomi karena gerakan-gerakan individu menyangkut barang-barang ekonomi.

Di sisi lain Peterson (1972) menulis, “dalam pengertian umum, migrasi biasanya didefinisikan sebagai orang-orang yang pindah secara relatif tetap dan berpindahan mereka melampaui jarak yang cukup jauh”.

Lebih jauh Peterson (1972) menjelaskan tentang migrasi pembaruan dan konservatif. Dikatakannya, “Barangkali yang paling hakiki adalah perbedaan antara migrasi pembaruan dan migrasi konservatif”. Migrasi pembaruan adalah perpindahan dalam rangka mencari sesuatu yang baru, sedang migrasi konservatif adalah perpindahan karena menanggapi suatu perubahan, sekalipun mereka berpindah, diharapkan mereka tetap memegang teguh cara hidupnya yang dulu di pemukiman yang baru.

Tiap jenis migrasi tersebut di atas, dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu migrasi primitif; migrasi paksaan; migrasi bebas; dan migrasi massa. Migrasi primitif adalah migrasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan manusia mengatasi tekanan lingkungan. Migrasi paksaan adalah migrasi karena tekanan lingkungan yang menyelenggarakan migrasi adalah pemerintah atau suatu lembaga semacam itu. Migrasi bebas adalah migrasi para pionir atau penganut agama yang memiliki pemahaman berbeda pemahaman umum. Dapat pula mereka adalah kelompok politik atau orang-orang yang mempunyai motivasi individu yang sama. Sedang migrasi massa, juga disebut migrasi berantai adalah terjadinya perpindahan besar-besaran dari semua lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan migrasi di Indonesia, Hugo (1978) membedakannya menjadi tiga jenis. Pertama, adalah transmigrasi. Topik ini telah banyak dipelajari secara intensif. Kedua adalah studi mobilitas yang mempunyai ciri-ciri karakteristik kelompok etnis. Ketiga – studi ini nyaris diabaikan – ialah yang berhubungan dengan migrasi desa – kota dan urbanisasi.

Selanjutnya Hugo menjelaskan bahwa perpindahan tampaknya merupakan suatu reaksi terhadap tekanan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam menghadapi tekanan tersebut, lazimnya terdapat tiga kemungkinan yang dilakukan masyarakat bersangkutan: pertama, mereka tetap bertahan di tempat, karena menganggap tempat yang sekarang adalah tempat terbaik dan dianggap paling banyak memberikan kemungkinan bagi terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Tentu saja tidak dilupakan, kemungkinan usaha perbaikan lingkungan hidupnya dan pembaharuan-pembaharuan, sehingga keadaan semula dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. Mereka ini termasuk secara pasif menerima tekanan tersebut dan memutuskan bahwa tempat mereka adalah yang paling baik. Kedua, mereka pindah tempat atau merantau/bermigrasi sebagai bentuk mobilitas. Ketiga, mereka melakukan peralihan antara keduanya, yaitu tetap di tempat lama, tetapi mencari pekerjaan atau bekerja di tempat lain, baik secara berkala, maupun terus-menerus.

Mantra (1991), memberikan beberapa bentuk migran, yaitu (a) migran seumur hidup, yaitu seseorang yang dicacah di suatu provinsi yang bukan provinsi tempat kelahirannya, (b) migran total, yaitu seseorang yang provinsi tempat tinggal akhir berbeda dengan provinsi tempat ia dicacah, dan (c) migran risen, yaitu seseorang di mana provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal lima tahun lalu.

Dari pengertian-pengertian tentang migrasi tersebut di atas, yang dikumpulkan unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya. Yakni, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain secara pamanen; secara sukarela atau paksaan; perpindahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.

Dapat pula disimpulkan bahwa yang menimbulkan gelombang migrasi adalah faktor-faktor pendorong, yang terdapat di tempat asalnya dan faktor penarik, yang berada di tempat tujuan. Faktor pendorong dan faktor penarik bekerja bersama-sama, sehingga mampu menggerakkan kelompok-kelompok manusia untuk bermigrasi.

1. Proses perantau (Migrasi)

Masyarakat Indonesia modern sukar dapat dipahami tanpa menghubungkannya dengan gerakan perpindahan penduduk di Nusantara ini. Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia sekarang mempunyai minoritas-minoritas etnis sebagai akibat dari mobilitas penduduk tersebut.

Kota-kota besar khususnya mencerminkan perubahan pola-pola kependudukan dari masyarakat Indonesia yang berbagai suku.

Studi tentang merantau yang akibatnya mempunyai jangkauan jauh terhadap kondisi sosial – ekonomi dan kebudayaan di daerah selama ini telah diabaikan, pada hal studi semacam ini benar-benar diperlukan, baik untuk alasan-alasan praktis maupun teoritis. Studi ini adalah suatu usaha untuk mengisi kebutuhan tersebut dan berusaha menganalisis masalah merantau sebagai gejala sosial yang berakar jauh di dalam keseluruhan sistem sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Kita akan mencoba menggali sebab akibat gejala ini dengan mempergunakan pendekatan banyak segi sambil mengemukakan empat masalah pokok: (a) Siapakah yang merantau ini; (b) mengapa mereka merantau; (c) Kemana mereka merantau; dan (d) apakah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan merantau itu.

Berbuat pindah atau tidak, merantau atau tidak, merupakan keputusan kata hati. Oleh sebab itu, pertimbangan yang matang harus benar-benar diperhitungkan sebelum sudah ada di negeri atau kampung orang, apalagi keperluan itu dibebani dengan segala resiko seperti meninggalkan anak – isteri dan sanak keluarga atau harus bekerja keras. Sementara tempat yang dituju belum bisa memberikan kepuasan dan keuntungan buat kehidupan mereka.

Dengan segala resiko di atas. Sang migran akhirnya sampai di daerah tujuan. Di tempat tujuan ini, ia mulai memasuki era baru dalam

kehidupan sebagai migran dan sekaligus mungkin berusaha agar diterima sebagai warga atau komunitas bukan hal yang mudah, paling tidak ia secara sadar atau tidak, harus menghayati dan mengikuti adat-istiadat setempat. Tanpa penghayatan dan partisipasi itu mungkin tumbuh rasa senasib yang merupakan suatu pengikat solidaritas komunitas. Bahkan tidak hanya semata-mata penghayatan dan mengadopsi nilai budaya setempat, untuk menumbuhkan rasa senasib tidak terlepas dari rasa cinta akan wilayah tempat tinggalnya yang baru. Selain itu, sebagai warga komunitas ia juga bisa mengenal bergaul dan dapat menghayati sebagian besar dari lapangan kehidupan warga masyarakat secara bulat.

Apabila dalam kehidupannya, sang migran belum mampu mewujudkan aspek di atas seperti perasaan senasib, cinta wilayah, saling bergaul secara utuh, maka sulit baginya untuk bisa diterima sepenuhnya sebagai warga masyarakat setempat. Apalagi jika ia dan migran lain hanyalah merupakan kelompok minoritas yang berbeda di tengah-tengah kelompok mayoritas. Namun demikian, partisipasi migran tersebut mungkin sudah bisa dianggap sebagai suatu pertanda bahwa ia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru.

Usaha untuk mengadaptasikan diri melalui interaksi sosial akan menghasilkan dimensi baru, yakni bisa berupa kerjasama, pertikaian. Kerjasama mengarah kepada integrasi, sedangkan persaingan atau pertikaian cenderung bersifat konflik.

Selanjutnya analisa Naim (1984) juga merupakan bahwa kepindahan suku bangsa di Indonesia disebabkan sistem sosial budaya yang berkembang di daerah mereka, misalnya sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau merupakan salah satu penyebab sebagian mereka dengan tekanan ekonomi menyebabkan orang Minang mengadu nasib di rantau orang. Keadaan tanah pertanian yang tidak begitu subur dan terbatas, sementara penangkapan ikan di sungai dan rawa-rawa sebagai penghasilan tambahan makin berkurang sehingga mendorong orang Banjar, terutama mereka yang menetap di daerah hulu sungai, merantau ke Sumatera dan Semenanjung Malaysia.

Tidak saja faktor pendorong, daya tarik daerah tujuanpun memengaruhi migrasi suku bangsa di Indonesia, termasuk kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah. Adanya irigasi yang dibangun oleh pemerintah di Simalungun dan Asahan, pemberian tanah, biaya perjalanan dan tinggal di daerah pemukiman, menyebabkan para petani Batak yang terlatih menggantikan petani ladang yang berpindah-pindah di daerah pesisir timur (Naim, 1984). Penyebab arus migrasi orang-orang Batak ini tampaknya punya kemiripan dengan penyebab membanjirnya transmigrasi Jawa ke Luwu, yaitu kombinasi antara berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah dan tekanan ekonomi di kampung asal (Afdol, 1976).

Redmana (1970) dalam hasil penelitiannya dan kawan-kawan mengenai perpindahan penduduk pedesaan ke kota-kota besar dan kecil di Jawa, Sumatera, Sumatera, dan Sulawesi menyimpulkan bahwa

penyebab utama urbanisasi kaum wanita ialah ikatan kekerabatan seperti adanya orang tua, suami, atau keluarga di kota. Sebaliknya di kalangan pria yang lebih dominan faktor pendidikan dan penghidupan yang lebih baik selain untuk mencari pekerjaan dan dipindah tugaskan.

Bagi orang Toraja misalnya, faktor utama yang memengaruhi perpindahan daerah yang didatangi terutama tersedianya kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih luas serta terbentuknya hubungan komunikasi yang lancar juga merupakan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pindah tidaknya mereka (Abustam, 1975).

Agar lebih dapat dipahami timbulnya arus migrasi dari suatu daerah ke daerah lain, akan dikemukakan teori Hechter tentang wilayah yang tidak berkembang. Teori Hechter dalam Cohn, (1982), membagi negara kebangsaan ke dalam daerah-daerah inti dan pinggiran. Daerah inti atau pusat bercirikan perkembangan ekonomi yang cepat dan sentralisasi politik, yang mempermudah politik ekspansi dan imperialisme. Daerah pinggiran mudah tunduk dan ditaklukan. Status dan ekonomi direstrukturisasi untuk kepentingan daerah.

Keterbelakangan daerah-daerah pedalaman suatu negara secara nasional merupakan produk langsung dari distorsi oleh negara inti. Hechter melihat adanya dua mekanisme utama manipulasi yang menimbulkan kerugian.

Pertama ialah pemanfaatan daerah pinggiran sebagai daerah pengambilan sumberdaya. Hechter berpegang pada pendapat bahwa

kontrol keuangan berada di daerah pusat. Kapital dialokasikan sedemikian rupa, sehingga pusat mempunyai berjenis-jenis industri dasar dengan pengolahan yang maju serta sektor-sektor jasa. Industri-industri noekstraktif ditawarkan di daerah-daerah pinggiran yang menghasilkan pendapatan yang tidak tepat bagi daerah.

Lebih jauh Hechter mengatakan bahwa keterbelakangan di daerah pinggiran, sebagian disebabkan oleh etnosentrisme para investor pusat. Keterbelakangan itu pula yang membuat mereka mengembangkan ideologi-ideologi yang menganggap rendah kebudayaan daerah. Etnosentrisme ini menjadi nyata dalam keputusan untuk mengadakan investasi.

Para investor pusat tidak berhasil mengumpulkan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan ekonomi di daerah pedalaman. Potensi di daerah pinggiran sangat diremehkan. Kapitalis-kapitalis pusat yakin bahwa modalnya akan lebih aman ditempatnya sendiri; mereka lalu mengadakan investasi berlebihan di pusat dan membiarkan pinggiran mati kelaparan tidak mempunyai dana. Dengan demikian penanaman modal di daerah inti menimbulkan kesempatan kerja yang luas di daerah tersebut. Sebaliknya di daerah-daerah pinggiran kesempatan kerja jauh lebih sempit.

2. Transmigrasi dan perantau mandiri

Transmigrasi pada dasarnya merupakan migrasi dalam negeri dari pulau yang padat penduduk menuju pulau lain yang jarang penduduk. Transmigrasi adalah istilah yang dipergunakan pemerintah Republik Indonesia untuk pemindahan penduduk antarpulau tersebut. Dibagi dalam dua jenis yaitu transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa, namun kecenderungan pada decade terakhir ini banyak migrant berinisiatif sendiri melalui migrasi spontan, selain jenis transmigrasi tersebut maka transmigrasi juga di bedakan dalam tiga kategori yakni: transmigrasi keluarga, transmigrasi local, dan transmigrasi biaya sendiri. (Andi Lolo 1986).

Pemindahan penduduk semacam ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan penjajahan Belanda; dengan nama kolonisasi. Jadi kolonisasi juga merupakan salah satu jenis migrasi dalam negeri yang diatur oleh Pemerintah Belanda.

Keyfitz & Nitisastro (1964) membagi kolonisasi ke dalam beberapa periode :

Pertama, periode sistem “cuma-cuma” (1905-1911). Pada periode ini kolonisasi merupakan pekerjaan coba-coba yang bertujuan mencari dasar teknik penyelenggaraan kolonisasi. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah kolonial.

Kedua, periode “sistem pinjam” (1912-1922). Pada periode ini para kolonis tidak dibiayai oleh pemerintah melainkan hanya diberi bantuan

uang untuk membayar utang mereka di Jawa dan membeli makanan dalam perjalanan. Angkutan menuju daerah baru ditanggung pemerintah dan untuk keperluan lain-lain dipinjam dengan bunga. Namun kedua cara ini juga mengalami kegagalan. Selama 18 tahun (1905-1922) kolonis yang dipindahkan mencapai 23.000 jiwa, berarti rata-rata 1300 jiwa per tahun. Akhirnya sejak tahun 1923 pengiriman kolonis dihentikan.

Ketiga, periode "sistem bawon" (1923-1942). Dalam sistem ini para kolonis meminta bantuan pemerintah untuk mendatangkan keluarganya agar dapat membantu panen pada mereka yang sangat berhasil. Biaya perjalanan ditanggung dulu oleh kolonis yang meminta. Kemudian timbulah prinsip bahwa kolonisasi harus didasarkan atas gotong royong dalam hubungan desa. Kolonisasi pada zaman itu prinsipnya bertujuan memindahkan penduduk dari pulau Jawa keluar Jawa

Di zaman Indonesia merdeka, transmigrasi mempunyai tujuan berbeda dengan kolonisasi di zaman penjajahan. Tujuan transmigrasi termaktub dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1972 pasal 2, dan terdapat beberapa jenis transmigrasi. (1) transmigrasi umum yang biayanya ditanggung pemerintah, (2) transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang didasarkan pada tujuan atau alasan tertentu. Termasuk dalam jenis ini ialah transmigrasi pribadi yang diselenggarakan badan swasta, dan transmigrasi sektoral yang diselenggarakan pribadi departemen tertentu, biasanya Departemen Sosial, (3) Transmigrasi keluarga, yakni para keluarga transmigran yang meminta diberangkatkan

oleh pemerintah. Tatkala mereka sampai di tempat baru, mereka ditanggung transmigran lama, (4) Transmigran lokal, yakni transmigran hanya berpindah di dalam satu provinsi. Mereka diatur dan dibiayai pemerintah, (5) Transmigrasi spontan atau swakarsa. Transmigrasi ini biayanya ditanggung transmigran yang bersangkutan, bisa pula oleh pihak lain yang bukan pemerintah, (6) Transmigrasi bekas pejuang. Transmigrasi ini merupakan usaha pemerintah untuk mengembalikan bekas pejuang ke masyarakat. Penyelenggaraannya adalah Biro Rekonstruksi Nasional ke daerah Kalimantan, (7) Transmigrasi pola sitiung. Pola penempatan transmigrasi ini dikoordinasikan Badan Pengembangan Daerah Transmigrasi (BPPDT) yang diintegrasikan dengan pembangunan daerah.

Berikutnya, transmigrasi swakarsa dibedakan menjadi empat jenis. Pertama, transmigrasi swakarsa dengan bantuan pemerintah berupa angkutan dan perumahan. Kedua, transmigrasi swakarsa bantuan Presiden (Program Banpres). Para transmigran jenis ini mendapat bantuan biaya transportasi dan keperluan pokok selama empat bulan. Ketiga, transmigrasi swakarsa tanpa bantuan biaya. Keempat, transmigrasi swakarsa terlepas sama sekali dari pengamatan pemerintah. Karena itu para migrannya tidak mendapat bantuan pemerintah, serta tidak masuk ke dalam statistik transmigrasi. Sementara transmigrasi swakarsa jenis pertama sampai ketiga mendapat bantuan pemerintah dan diperhitungkan dalam statistik.

Lantaran jenis transmigrasi ini tidak diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1972, maka menurut penjelasan pasal 1 ayat a Undang-undang tersebut, jenis transmigrasi ini tidak boleh disebut dengan istilah transmigrasi. Karena itulah transmigrasi jenis keempat ini dinamakan migrasi swakarsa.

Berkaitan dengan migrasi ini, Isaac (1947) membedakan antara migrasi paksaan dan migrasi bebas. Ia menjelaskan, "Jika kita mengelompokkan migrasi paksaan sebagai kategori berbeda, maka migrasi dapat diartikan sebagai gerakan dari individu yang bebas dengan tujuan terakhir untuk memperoleh perubahan dalam tempat tinggal.

Lebih jauh Naim (1984) memasukkan tujuan sebagai unsur keempat ke dalam definisi merantau atau migrasi khas orang Minangkabau. Merantau adalah mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman. Unsur-unsur pokok merantau dari Naim adalah sebagai berikut : (1) meninggalkan kampung halaman; (2) dengan kemauan sendiri (3); untuk jangka waktu lama atau sebentar; (4) dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman; (5) biasanya dengan maksud kembali pulang; dan (6) merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Pengertian migrasi swakarsa yaitu perpindahan tempat tinggal melampaui daerah etnis sendiri, atas kemauan sendiri yang dilandasi solidaritas kelompok yang kuat, dengan tujuan mendapatkan penghidupan

yang lebih baik di tempat tujuan. Perpindahan ini diperlancar dengan adanya saluran mobilitas yang baik.

Unsur-unsur utama di dalam pengertian tersebut ialah : (1) perpindahan melampaui daerah etnis sendiri; (2) bertujuan menetap; (3) atas kemauan sendiri; (4) adanya solidaritas kelompok yang kuat; (5) bermaksud mendapatkan penghidupan yang lebih baik; dan (6) tersedia saluran mobilitas.

C. Konsep Interaksi Sosial

Proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu serta kelompok dengan kelompok melalui proses intraksi sosial. Selo Soemartjan dan Soelaeman S dalam Soekanto, (2001) menyebutkan bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition) dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, proses ini dinamakan akomodasi (accommodation); dan ini berarti bahwa kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Kimbal Young dalam Soekanto (1990) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan

sosial oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Istilah interaksi itu sendiri dalam kamus sosiologi diartikan sebagai stimulasi atau tanggapan antara manusia atau hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Sedangkan istilah sosial diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan perilaku yang berkaitan dengan proses sosial (Soekanto, 1990).

Sistem sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antara individu yang berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu pedoman pada norma-norma sosial. Inti dari sistem sosial adalah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan, yakni aktivitas yang terjadi sekarang merupakan pengulangan dari sebelumnya, kemudian akan diulang dengan cara yang sama. Di dalam sistem sosial terdapat prinsip-prinsip tertentu yang berhubungan dengan keseragaman anggapan tentang kebenaran, sehingga hubungan sosial antara kelompok dapat lebih terjamin.

Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sistem sosial, karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial, antara lain; orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan serta keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-

unsur sistem itu menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan merinci, unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peran dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.

Selain itu status sangat erat hubungannya dengan peranan, peranan seseorang dilakukan sebesar hak dan kewajibannya yang diatur dalam status. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu didasarkan pada norma-norma sosial yang dianggap sebagai pengawal perilaku individu-individu agar sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat terdapat seperangkat hubungan timbal balik antara hubungan antara peranan-peranan sehubungan dengan status sosial masing-masing individu yang terlibat. Oleh karena itu masyarakat mempunyai sistem sosial. Ada beberapa ciri kehidupan masyarakat (kolektif) yang menunjuk pada unsur-unsur sistem sosial, yaitu: (1) adanya pembagian kerja, (2) adanya ketergantungan antara individu, (3) adanya kerja sama, (4) adanya komunikasi dua arah, dan (5) adanya perbedaan-perbedaan fungsi antarindividu (Loyd; 1986).

Abdulsyani (1995), mengatakan bahwa struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan. Struktur sosial sering digunakan untuk menjelaskan "keteraturan sosial", yaitu menunjuk prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Secara ringkas, dapat dikemukakan bahwa tekanan

dalam analisis struktural fungsional adalah pada mekanisme yang meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial.

Tonnies dalam bukunya *Gemeinschaft and Gesellschaft* (1954) memfokuskan kajiannya pada analisis psikologi dalam aspek motivasi individu sebagai “manusia memiliki keinginan”. Secara spesifik, David Allen Karp mengkaji karya Tonnies mengemukakan bahwa ada dua hubungan dalam masyarakat menurut Tonnies yaitu *Gemeinschaft* (paguyuban) dan *Gesellschaft* (patembayan). *Gemeinschaft* merupakan jenis atau bentuk kehidupan tradisional masyarakat yang ada dalam suatu organisasi feodal di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni serta kekal, sementara *Gesellschaft* adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek di mana solidaritas sosial menjadi penting yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan identitas umum anggotanya.

Selanjutnya Tonnies menjelaskan dua tipe kemauan dasar manusia yaitu *Wessenwille* dan *Kurwille*. Tipe pertama yaitu *Wessenwille* didasarkan perasaan tradisi atau keyakinan orang, sedangkan tipe kedua (*Kurwille*) didasarkan kemauan rasional untuk mencapai tujuan. Kedua tipe ini memengaruhi bentuk dan ciri interaksi atau hubungan orang dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Tipe pertama menjadi dasar hubungan orang dalam suatu kelompok masyarakat *Gesellschaft* sedangkan tipe kedua pada kelompok *Gesellschaft*. Ciri hubungan sosial pada kelompok masyarakat *Gemeinschaft* . didasarkan atas kekerabatan

(hubungan darah), ketetanggaan (satu wilayah), dan persahabatan (perasaan), sedangkan bentuk-bentuk hubungan sosial pada masyarakat *Gesellschaft* didasarkan atas kontak, persetujuan undang-undang, jalinan yang rasional, individualistis dan kepentingan, (Kamaruddin 1999).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka jelaslah hubungan sosial pada kelompok paguyuban pada umumnya merupakan ciri masyarakat pedesaan sedang bentuk hubungan sosial pada kelompok patembayan itu terdapat pada ciri masyarakat perkotaan.

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam konsep Talcott Parson (1937) mengenai perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Parson mengaitkan perbedaan kedua tipe masyarakat tersebut dengan suatu yang dinamakan hubungan “kecintaan dan kenetralan”. Masyarakat tradisional cenderung memiliki hubungan “kecintaan”, yakni hubungan yang mempribadi dan emosional. Masyarakat modern cenderung memiliki hubungan “kenetralan”, yakni hubungan kerja yang tidak langsung, tidak mempribadi dan berjarak. Parson juga merumuskan hubungan “kekhususan dan universal”. Masyarakat tradisional cenderung untuk berhubungan dengan anggota masyarakat dari suatu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk untuk memikul beban tanggung jawab bersama, sementara anggota masyarakat berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma universal, lebih tidak terikat dengan tanggung jawab kelompok dan kekhususan. Masyarakat tradisional biasanya memiliki kewajiban-kewajiban

kekeluargaan, komunitas dan kesukuan, sementara masyarakat modern lebih bersifat individualistik (orientasi diri – sendiri). Parson juga menyatakan, bahwa masyarakat tradisional memandang pentingnya status warisan dan bawaan, sebaliknya masyarakat modern yang tumbuh dalam pasar persaingan yang ketat jauh lebih banyak memperhatikan prestasi. Selanjutnya, Parson menyatakan bahwa masyarakat tradisional belum merumuskan fungsi-fungsi kelembagaannya secara jelas dan karenanya akan terjadi pelaksanaan tugas yang tidak efisien, sebaliknya masyarakat modern telah merumuskan secara jelas tugas masing-masing kelembagaan.

Dilihat dari uraian-uraian di atas sangat jelas bahwa hubungan sosial pada masyarakat perkotaan yaitu masyarakat *gesellschaft* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hubungan yang terjalin bersifat formal karena berdasarkan perjanjian-perjanjian atau kontrak
2. Hubungan didasarkan oleh kepentingan atau tujuan.
3. Hubungan yang bersifat rasional.
4. Hubungan yang tidak intim yaitu impersonal.

Hubungan sosial pada masyarakat desa dan masyarakat perkotaan sangat jelas berbeda, di desa sifat gotong royong di kota hampir tidak terikat lagi sehingga tetangga atau keluarga tidak lagi saling mengenal secara mendalam tetapi memperlihatkan karakter eksidentil, terutama pada mereka yang hidup di perumahan-perumahan mewah dengan

rumah-rumah yang bertingkat serta pagar-pagar yang tinggi. Kemudian pada masyarakat kota dalam pergaulan hidup, kepentingan individu lebih penting dari kepentingan masyarakat banyak (bersifat individualistis). Tingkah laku masyarakat kota kreatif, radikal, dan dinamis menerima perubahan-perubahan dari kebiasaan-kebiasaan baru tiap tindakan pada masyarakat kota umumnya didasarkan oleh rasio yang sehat tidak terikat oleh adat kebiasaan.

Selanjutnya George Simmel dalam Soekanto, (2001) mengemukakan mengenai hubungan sosial bahwa dasar awal dari pembentukan masyarakat selain keluarga adalah kedekatan geografis atau ketetanggaan. Namun, semakin kompleks dan heterogenitasnya dan terspesialisasinya pembagian kerja maka dasar pembentukan kelompok semakin abstrak dan rasional. Akibatnya individu mempunyai kesempatan yang besar untuk masuk ke dalam berbagai kelompok akan tetapi keikutsertaan mereka terbatas pada fungsi atau peran sosial mereka dalam kelompok-kelompok mereka.

Pada masyarakat kota individualistis dan impersonalistis dalam hubungan pribadi-pribadi menimbulkan dampak di mana individu dalam hubungan satu dengan lainnya lebih menuntuk tujuan dan kepentingan tertentu saja. Semakin banyak individu yang berinteraksi akan merubah sifat hubungan sosial dalam masyarakat modern. Orang kota membentuk suatu mekanisme untuk melindungi diri mereka dari berbagai

stimulus yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan mereka menjadi rasional dan individual.

Emile Durkheim, (1964) membagikan hubungan sosial pada masyarakat desa dan masyarakat kota dengan istilah Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik. Solidaritas mekanik merupakan karakteristik masyarakat tradisional (desa) dengan ciri-ciri yaitu sistem pembagian kerja yang rendah, hukum yang represif dan umum, sehingga masyarakat seperti ini akan memilih tingkat integritas sosial yang tinggi. Sebaliknya Solidaritas Organik merupakan karakteristik masyarakat kota yang telah maju dengan sistem pembagian kerja yang kompleks dan meningkatkan hubungan antara individu yang bersifat kontekstual. Pada masyarakat ini tingkat integritas rendah.

Konsep lain mengenai hubungan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari kelompok primer dan kelompok sekunder kelompok primer dari Charles Harton Cooley dalam Komanto, (1993) mengenai hubungan timbal balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat kelompok primer yang dimaksud adalah keluarga kelompok sepermainan, rukun tetangga, teman bermain, rukun warga, serta komunitas orang dewasa.

Kelompok Sekunder adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak langgeng. Hubungan kelompok primer yang merupakan ciri masyarakat sederhana yang dalam

berhubungan sifatnya pribadi, bersifat suka rela dan saling mengenal. Cooley dalam uraian tentang kelompok primer ini sangat sinis melihat perkembangan di masyarakat modern yang makin lama banyak dipengaruhi oleh hubungan yang didasarkan perhitungan untung rugi dan makin berkurang bentuk-bentuk kehidupan bersama berdasarkan kasih sayang seperti keluarga, rukun tetangga dan kelompok-kelompok persahabatan. Cooley menginginkan kelompok itu dipelihara pada masyarakat modern. Kelompok sekunder yang merupakan ciri masyarakat kota dalam berhubungan kurang akrab hubungan kontrak.

Konsep hubungan sosial di kota dapat pula dilihat pada teori pertukaran yang dikemukakan oleh George C. Homans dalam Kamanto, (1993). Homans berpendapat bahwa pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antara orang-orang tertentu. Jadi dapat disimpulkan pada masyarakat kota yang yang satu tujuan yang menguntungkan apabila interaksi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan atau tidak ada suatu (imbalan) yang diterima maka kecenderungan hubungan itu makin kecil frekuensinya, namun sebaliknya bila hubungan itu menguntungkan maka frekuensinya semakin besar. Selanjutnya, Homans dalam Ritzer (1992) mengatakan bahwa tiap interaksi sosial yang terjadi selalu mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan proposisi yang perlu diperhatikan dalam interaksi sosial yaitu:

- a. Makin tinggi ganjaran yang diperoleh atau yang akan diperoleh semakin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.
- b. Sebaliknya, semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman, yang akan diperoleh semakin kecil tingkah laku yang serupa akan diulang.

Jadi interaksi sosial yang terjadi apabila menguntungkan maka interaksi (hubungan) itu semakin intensif demikian pula sebaliknya semakin rugi orang dalam berhubungan akan semakin besar orang untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut.

Teori pertukaran dari Petter Blau dalam Poloma, (1994) dalam hubungan sosial yang muncul adalah transaksi dari pertukaran sosial. Pertukaran sosial yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan terhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Jadi, kesimpulan dalam proses interaksi sosial khususnya hubungan bertetangga harus bersifat timbal balik yang menguntungkan.

Fungsi kota sebagai pusat ekonomi dan intelektual juga turut mempengaruhi hubungan sosial di antara penduduknya, begitu besarnya pengaruh uang dalam kehidupan modern, menimbulkan kecenderungan di mana nilai individu lebih ditentukan oleh uang. Gaya hidup tidak lagi ditentukan oleh tradisi tetapi oleh uang. Nilai kualitatif dalam hubungan antara manusia menjadi kurang dan diganti oleh nilai kuantitatif.

Pembahasan lain mengenai hubungan sosial (ketetangaan) di perkotaan dan faktor-faktor yang memengaruhi dikemukakan oleh Louis Wirth dalam esainya "Urbanisme sebagai cara hidup" (Urbanisme as Way of Life) dalam Munandar, (1996), menganggap pemusatan penduduk di dalam kota menambah besar jumlah kepadatan dan heterogenitas penduduk kota menciptakan segregasi sosial, impersonalitas dan mobilitas sosial maupun geografis. Semakin heterogen penduduk kota, maka makin jelas ciri-ciri yang berkaitan dengan masyarakat kota.

Selanjutnya, Louis Wirth menguraikan masing-masing variabel tersebut; jumlah penduduk kota yang besar melibatkan variasi penduduk lebih besar pula. Keadaan ini membawa dampak, seperti semakin tingginya perbedaan dalam proses interaksi, semakin terbatasnya kemungkinan untuk saling mengenal secara pribadi. Orang-orang kota biasanya mengenal orang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang ditemukan setiap hari. Maka dari itu segmentalisasi hubungan antara manusia menjadi sulit dihindarkan.

Variabel kepadatan berkaitan jumlah manusia yang ada dalam suatu wilayah. Kepadatan ini menambah kompleksitas struktur sosial kota. Secara fisik kontak di antara manusia kota memang dekat, namun secara sosial mereka jauh. Hubungan mereka lebih bersifat impersonal dan pada akhirnya menimbulkan kesepian dan frustrasi. Kepadatan penduduk kota membatasi keterbatasan ruang sehingga persaingan ketat untuk memperoleh uang.

Dijelaskan pula bahwa yang memungkinkan masyarakat berproses adalah setiap orang mempunyai peranan yang harus dijalankannya, maka interaksi individu dengan kelompok hanya dapat dimengerti dalam kerangka peran yang dilakukan oleh individu George Simmel dalam Soekanto,(1993).

Berikutnya dikemukakan di mana suatu interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak dapat memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Adanya kontak sosial (*social contact*)

Kata kontak berasal latin, con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango berarti menyentuh. Secara harfiah kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi ketika terdapat hubungan badaniah, oleh karena orang dapat melakukan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, sebagai interaksi ketika berbicara dengan pihak lain tersebut. Perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan lainnya melalui telepon, telegraf, radio, dan surat yang tidak memerlukan hubungan badaniah. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak sosial.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Antara orang-perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya.
2. Antara orang-perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, misalnya apabila seseorang merasakan bahwa

tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat.

3. Antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, misalnya dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya di suatu wilayah yang baru dibuka.

Perlu dipahami bahwa terjadi suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial dapat bersifat positif yang mengarah kepada kerja sama. Suatu ilustrasi, seorang pedagang menawarkan dagangannya dan diterima dengan baik sehingga terjadi jual beli. Kontak sosial yang bersifat negatif yakni merujuk kepada pertentangan atau dapat pula menghasilkan interaksi sosial. Hal ini lebih dicirikan kepada kemungkinan tidak terjadinya jual beli.

Kontak dapat pula bersifat primer, terjadinya apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu, berhadapan muka yakni berjabat tangan dan saling senyum. Kontak yang bersifat sekunder memerlukan suatu perantara, yakni mengagumi seseorang melalui perantara orang lain.

Proses interaksi sosial tidak akan berlangsung dengan baik bila tidak ditunjang oleh komunikasi, yakni proses penyampaian pesan yang berwujud pembicaraan, gerak tubuh, atau sikap.

b. Adanya komunikasi

Arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, dalam kaitan ini dapat berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang-orang bersangkutan, kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain.

Dengan adanya komunikasi yang dimaksud, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang perorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Hal ini merupakan bahan untuk menentukan reaksi yang akan dilakukannya.

Komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Komunikasi juga bisa melahirkan pertikaian sebagai akibat salah faham.

Manusia memiliki keinginan untuk mengetahui sehingga senantiasa perlu berkomunikasi dengan lingkungannya untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Manusia berkomunikasi terutama untuk menyatukan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar, dan untuk memengaruhi orang lain, Thomas M Scheidel dalam Mulyana, (2000). Bahkan ungkapan yang lebih ekstrim oleh Wilbur Schramm, bahwa komunikasi dan masyarakat

adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin akan dapat mengembangkan komunikasi (Cangara, 2006). Komunikasi diperlukan untuk mengatur tatakrma pergaulan antarmanusia, sebab dengan berkomunikasi secara baik akan memberi pengaruh langsung pada keseimbangan seseorang dalam masyarakat.

Kegagalan komunikasi menurut Schramm dan Kincaid (1984) disebabkan oleh : (1) komunikasi dan pengertian yang tidak sejalan dengan baik, (2) sikap tidak percaya, dan (3) adanya perlawanan terhadap kepercayaan, nilai serta tindakan yang dianjurkan.

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Neison dalam Mulyana, (2001) , secara general komunikasi mempunyai dua fungsi utama yakni, *Pertama*, untuk menjaga kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik meningkatkan keselamatan pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain. *Kedua*, untuk kelangsungan hidup masyarakat, yaitu memperbaiki kehidupan sosial dan mengembangkan peradaban suatu masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell mengemukakan tiga fungsi dasar yang menjadi faktor penyebab manusia berkomunikasi yakni, (1) hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, (2) upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, (3) untuk melakukan transformasi warisan sosial. (Cangara, 2006).

Manusia sebagai makhluk sosial mustahil bisa hidup tanpa ditopang komunikasi, di mana kepribadian manusia akan terbentuk sepanjang hidupnya. Komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi seseorang sehingga melalui komunikasi orang menemukan jati dirinya, mengembangkan konsep diri dan menetapkan hubungan dengan manusia lainnya serta dengan lingkungannya. Komunikasi paling sedikit dipandang dari empat dimensi yaitu: (1) dimensi fisik, (2) dimensi sosial, (3) dimensi psikologis dan (4) dimensi temporal (Liliweri, 1994). Dimensi fisik mengacu pada lingkungan fisik yang memengaruhi proses komunikasi, dimensi sosial adalah komunikasi yang berada dalam situasi, status dan peran yang dimiliki peserta komunikasi ketika berkomunikasi satu sama lain, dimensi psikologis mengacu pada aspek psikologis seperti drive, need, motivasi dan sikap yang memengaruhi komunikasi, sedangkan dimensi temporal mengacu pada waktu yang tepat untuk melangsungkan proses komunikasi

Lebih lanjut Bateson, Watzlawick dalam Littlejohn (1996) mengemukakan ada lima aksioma dasar yang dapat untuk memahami komunikasi dalam hubungan, *Pertama* orang tidak bisa tidak berkomunikasi, *kedua* setiap komunikasi yang terjadi, meliputi dua pesan yakni pesan isi dan pesan hubungan, *ketiga* interaksi yang terjadi selalu diorganisasikan ke dalam pola-pola yang bermakna, *keempat* interaksi itu menggunakan kode digital dan analog, *kelima* mencocokkan atau mengaitkan pesan dalam berinteraksi. Aksioma pertama bermakna bahwa

setiap perilaku yang nampak pada individu bersifat komunikatif dan mungkin juga tidak komunikatif. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa dihadapan orang lain, individu harus mengkomunikasikan sesuatu hubungan dengan orang lain.

Aksioma kedua menggambarkan setiap percakapan yang terjadi antarmanusia senantiasa diliputi dua pesan yakni pesan isi dan pesan hubungan, hal ini bila terjadi interaksi antarindividu maka akan mengaitkan informasi pada yang lain.

Sedangkan aksioma ketiga, bahwa interaksi selalu diorganisasikan ke dalam pola-pola yang bermakna sehingga dapat dipahami oleh peserta komunikasi. Seperti penggunaan kata-kata dalam komunikasi verbal tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah. Diperlukan adanya pengorganisasian kata, sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Dengan demikian penggunaan kalimat yang telah disusun secara rapi, sederhana, dan bermakna, dapat memberi suatu pengertian yang jelas.

Aksioma keempat, sangat berkaitan dan memiliki hubungan dengan obyek yang sebenarnya. Kode digital yang lazim dalam komunikasi antara manusia adalah bahasa, di mana bunyi, kata dan frase yang digunakan merupakan kode digital yang diatur untuk mengkomunikasikan kode non-verbal tertentu Watzlawick dalam Littlejohn, (2000). Sedangkan kode analog menurut Watzlawick, sangat berbeda dengan digital. Mereka menyebutkan kode non-verbal adalah analog. Dengan demikian, meskipun kode digital dan analog berbeda, tetapi keduanya digunakan

secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya kata-kata yang bersifat digital dapat dikomunikasikan dengan berbagai cara yang bersifat analog (keras, lembut, tersenyum, marah dan sebagainya).

Aksioma kelima adalah "*the matching or meshing of messages in interaction*"; bahwa dalam kegiatan hubungan melalui komunikasi, para peserta komunikasi senantiasa mencocokkan atau mengaitkan pesan-pesan yang digunakan dalam interaksi itu.

Dapat dikemukakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan yang sifatnya timbal balik dan mempunyai perilaku dari pihak-pihak bersangkutan melalui kontak langsung dan pembicaraan.

Selanjutnya Gillin dan Gillin (1947) membagi dua (2) macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial yakni proses yang asosiatif dan disosiatif.

1. Proses yang asosiatif digambarkan sebagai suatu proses yang membuat hubungan antara individu maupun kelompok manusia semakin akrab. Adapun yang termasuk dalam kategori ini di antaranya kerja sama, akomodasi, dan asimilasi.
 - a. Kerja sama, yang dimaksud sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan bersama.
 - b. Akomodasi, yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok manusia. Dalam hal ini, berkaitan dengan

norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai suatu kestabilan.

- c. Asimilasi, ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia meliputi usaha mempertinggi kesatuan tindak dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

Uraian ini menjelaskan suatu kerja sama melalui interaksi antara orang perorangan atau kelompok manusia. Usaha kerja sama tersebut berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

2. Proses disosiatif, lebih bersifat sebagai suatu proses yang cenderung membuat hubungan antara individu atau kelompok manusia menjadi renggang, persaingan, kontraversi, dan pertentangan atau pertikaian dikategorikan masuk dalam kelompok ini, yang kemudian dijelaskan:
 - a. Persaingan diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum atau mempertajam prasangka tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

- b. Kontraversi, terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang.
- c. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Dari beberapa pengertian tersebut selanjutnya dikemukakan bahwa suatu interaksi dapat pula terjadi karena persaingan kemudian melahirkan perasaan tidak suka yang menunjuk pada pertentangan dan menyebabkan munculnya kekerasan.

D. Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial dicetuskan oleh Thibaut dan Kelley dalam Rakhmat (2005). Teori ini mengkaji kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, di mana hubungan itu mempengaruhi kontribusi orang lain. Orang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain dengan mempertimbangkan konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang telah dilakukan. Orang akan memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan tersebut atau pergi meninggalkannya. (Bungin, 2006).

Teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan suatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Asumsi yang mendasari seluruh analisis Thibault dan Kelley, adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama berhubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya (Rakhmat, 2005). Ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan merupakan empat konsep pokok dalam teori ini.

Ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran ini tidak mutlak harus berupa uang atau materi, tetapi penerimaan sosial, dan dukungan terhadap nilai yang dianut oleh seseorang juga termasuk dalam hal ini. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain.

Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau hal-hal yang dapat menimbulkan efek yang kurang menyenangkan.

Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang lain yang terlibat di dalamnya. Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Hasil atau laba diperoleh dari selisih antara akibat positif yang terjadi dari suatu hubungan dan akibat negatif yang ditimbulkan dari

hubungan itu. Bila seorang individu merasa, dalam suatu hubungan interpersonal, bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba.

Ukuran bagi keseimbangan pertukaran antara untung dan rugi dalam hubungan dengan orang lain disebut *comparison levels*. Orang yang mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan orang lain, maka orang akan merasa puas dengan hubungan itu. Sebaliknya, apabila orang merasa rugi berhubungan dengan orang lain dalam konteks upaya dan ganjaran, maka orang cenderung menahan diri atau meninggalkan hubungan tersebut.

Biasanya dalam konteks hubungan ini, seseorang memiliki banyak alternatif yang dapat diberikan dalam model pertukaran sosial di mana pilihan-pilihan dan alternatif tersebut memiliki ukuran yang dapat ditoleransi seseorang dengan pertimbangan alternatif-alternatif yang dia miliki. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau nilai-nilai budaya atau kepercayaan yang dianutnya.

Asumsi tentang perhitungan antara ganjaran dan upaya (untung-rugi) tidak berarti bahwa orang selalu berusaha untuk saling mengeksploitasi, tetapi orang lebih memilih lingkungan dan hubungan yang dapat memberi hasil yang diinginkan, (Sendjaja, 1993). Tentunya kepentingan masing-masing orang akan dapat dipertemukan untuk dapat

saling memuaskan daripada mengarah pada hubungan yang eksploitatif. Hubungan yang ideal akan terjadi bilamana kedua belah pihak dapat saling memberikan cukup keuntungan sehingga hubungan tersebut menjadi sumber yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak.

Titik sentral dari komunikasi antarmanusia adalah hubungan manusia, oleh karena itu seorang komunikator harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan individu yang dilibatkan dalam proses komunikasi.

Menurut “ *Maslow Holistic Dynamic Theory*”, ada tiga asumsi yang penting mengenai sifat pokok pada manusia, yaitu: (1) manusia adalah makhluk yang berkeinginan, ia senantiasa menginginkan suatu, dan keinginannya bertambah terus; (2) suatu kebutuhan yang telah terpenuhi tidaklah merupakan motivator perilaku, hanya kebutuhan yang tidak terpenuhi sajalah yang memotivasi perilaku; (3) kebutuhan-kebutuhan manusia itu tersusun dalam tingkat-tingkat kebutuhan tertentu, (Sunarjo 1997).

Selanjutnya tentang kebutuhan manusia, Abraham Maslow dalam Sunarjo (1997) membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan, yaitu : (1) *Physiological needs* (kebutuhan fisik), (2) *Safety needs* (kebutuhan keselamatan dan keamanan), (3) *Social needs* (kebutuhan untuk diperhitungkan dalam masyarakat), (4) *Esteem needs* (kebutuhan untuk dihargai sebagai mana mestinya), dan (5) *Self-actualization needs* (kebutuhan untuk mengembangkan diri).

Dengan mengetahui tingkat kebutuhan manusia, maka untuk menciptakan komunikasi yang mengena, seorang komunikator harus memperhatikan kebutuhan komunikannya. Dengan demikian dapat dilakukan aktivitas memengaruhi seseorang yang dikehendaki.

E. Model Peran (*Role Model*)

Bila model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang, model peranan melihatnya sebagai panggung sandiwara, di sini setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan ekspektasi peranan (*role expectation*) dan tuntutan peranan (*role demands*), memiliki keterampilan peran (*role skills*), dan terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan.

Ekspektasi peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Guru diharapkan berperan sebagai pendidik yang bermoral dan menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, Jenderal diharapkan berperan sebagai pembina tentara yang berani dan tegas, suami diharapkan mencintai dan menghormati istrinya. Jika guru yang berbuat jahat, jenderal yang takut kecoak, suami yang memperbudak istrinya, menjadikan ekspektasi peranan yang tidak terpenuhi

Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Desakan

sosial dapat berwujud sebagai sanksi sosial dan dikenakan bila individu menyimpang dari peranannya.

Keterampilan peranan adalah kemampuan memainkan peranan tertentu; kadang-kadang disebut juga kompetisi sosial (*social competence*). Di sini sering dibedakan antara keterampilan kognitif dan keterampilan tindakan. Keterampilan kognitif menunjukkan kemampuan individu untuk mempersepsi apa yang diharapkan orang lain dari dirinya (ekspektasi peranan). Keterampilan tindakan menunjukkan kemampuan melaksanakan peranan sesuai dengan harapan-harapan ini. Dalam kerangka kompetensi sosial, keterampilan peranan juga tampak pada kemampuan “menangkap” umpan balik dari orang lain sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan peranan sesuai dengan harapan orang lain. hubungan interpersonal amat bergantung pada kompetensi sosial ini.

Konflik peranan terjadi bila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif, misalnya seorang bapak yang berperan juga sebagai polisi untuk menangani perkara anaknya, atau wanita muda yang memainkan peran istri, ibu, dan pengacara sekaligus; atau bila individu merasa bahwa ekspektasi peranan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya dan konsep diri yang dimilikinya. Agak dekat dengan konflik peranan ialah kerancuan peranan. Ini terjadi jika individu berhadapan dengan situasi ketika ekspektasi peranan tidak jelas baginya.

F. Hasil Studi Terdahulu

Penelitian ini menekankan pada analisis orang Bugis perantau di kota Samarinda Kalimantan Timur dan Kota Palu Sulawesi Tengah yang sudah sejak lama merantau dan menetap dalam menjalani segala aspek kehidupannya di kedua tempat tersebut. Sesuai dengan hal tersebut, focus penelitian akan diarahkan kepada pola interaksi serta proses sosial yang melingkupinya baik secara interen maupun secara eksteren.

Hasil penelitian terdahulu yang ditelaah dan menjadi sumber kepustakaan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang menyangkut konsep tersebut di atas, khususnya yang dilakukan pada orang dan masyarakat Bugis. Hasil penelitian terdahulu secara singkat dikemukakan sebagai berikut.

Tagiling (2001) mengenai faktor penghambat interaksi sosial etnik Bugis dengan masyarakat Kefamenanu Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini antara lain dibangun dari suatu asumsi bahwa pendidikan formal yang ditempuh akan membantu seseorang atau sekelompok orang untuk semakin memperakrab interaksi. Keakraban hubungan sosial tentunya akan memperlancar usaha orang Bugis diperantauan.

Dalam hal ini, etnik Bugis di Kelurahan Kefamenanu memandang persaingan di bidang pendidikan bukanlah suatu hal yang prinsip. Kegunaan pendidikan bagi mereka cukup mampu membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi hanya sekedar membuang waktu dan biaya yang seharusnya

dimanfaatkan untuk berusaha. Dikemukakan pula bahwa gengsi sosial lebih diutamakan kepada kepemilikan ekonomi. Untuk itu, kompetisi dalam usaha di bidang ekonomi senantiasa menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini juga dimotivasi alasan merantau yaitu memperbaiki kondisi kehidupan keluarga. Itulah sebabnya sehingga jenjang pendidikan yang ditempuh etnik Bugis di kelurahan ini relatif rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuriadi (2003) tentang interaksi sosial antar nelayan etnik Bugis dengan nelayan etnik Rote di Kelurahan Oesapa kota Kupang Nusa Tenggara Timur, menemukan adanya perbedaan latar belakang antara kedua etnik nelayan, yakni etnik Bugis merupakan nelayan intensif dan etnik Rote nelayan subsistem. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh penguasaan teknologi dan teknik penangkapan ikan. Nelayan etnik Bugis lebih menguasai teknologi dan teknik penangkapan ikan yang relatif lebih maju dibandingkan nelayan etnik Rote.

Namun yang menarik adalah perbedaan ini justru merupakan kondisi yang mendorong terciptanya saling ketergantungan secara fungsional. Dengan perbedaan ini pula selanjutnya memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara kedua etnik tersebut. Kerja sama yang dimaksud lebih cenderung bersifat asosiatif daripada disosiatif.

Etnik Bugis mendiami Kelurahan Oesapa beragama islam, begitu pula nelayan etnik Rote yang beragama Kristen Protestan. Perbedaan kepeganutan agama tersebut relatif tidak sampai pada fanatisme

keagamaan yang sempit bagi masing-masing etnik. Terkikisnya fanatisme keagamaan dalam interaksi setiap hari karena adanya saling ketergantungan dalam berbagai hal terutama di bidang ekonomi. Kedua etnik tersebut justru merasa khawatir bila terjadi konflik sosial karena isu agama. Hal ini dianggap akan membawa dampak yang cukup berarti terutama dibidang ekonomi.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh isu agama senantiasa dihindari dan dicegah sedini mungkin. Untuk itu, kedua etnik berusaha menjaga dan mempraktekkan sikap toleransi melalui interaksi setiap hari. Hal ini terlihat ketika hari raya keagamaan masing-masing, mereka saling mengunjungi, memberi selamat dan bersilaturahmi. Demikian halnya jika membangun tempat ibadah, mereka saling membantu dalam bentuk sumbangan material dan atau sumbangan tenaga. Kalau sekiranya terdapat indikasi akan terjadinya konflik yang bernafaskan agama akan secepat mungkin diselesaikan oleh tokoh agama masing-masing.

Rustan (2007), tentang perilaku komunikasi orang Bugis dalam hubungan antar manusia menurut Islam menemukan, salah satu faktor keberhasilan orang Bugis yang menyebabkan mereka diterima dimana dan kapan saja oleh komunitas yang mereka datangi, adalah kemampuan untuk membawakan dan menempatkan diri yang tercermin pada kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat di mana ia berada dengan mengedepankan keterbukaan yang didasari prinsip *sipakatau* (saling memanusiaikan), *siammasei* (saying-menyayangi), *siasseajingeng*

(kekeluargaan), *lempu'* (kejujuran), *getting* (keteguhan), *warani* (keberanian), dan *ada-tongeng* (perkataan benar). Prinsip komunikasi ini telah membentuk perilaku orang Bugis yang senantiasa sesuai antara perbuatan dan perkataan atau *Taro ada taro gau*.

Orang Bugis menerima siapa saja yang datang padanya tanpa bersikap mencurigai, tetapi selalu menaruh atau menunjukkan harapan positif *madedeng kapang* kepada setiap orang. Bagi orang Bugis, setiap orang dipandang akan membawa suatu kebajikan pada dirinya dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi sesama manusia, orang Bugis menggunakan strategi *sipakalebbi* (saling memuliakan/menghargai), *sipakainge'* (saling mengingatkan), *manini* (kewaspadaan), *assitinajang* (kepatutan), *nyamengkininnawa* (menyenangkan hati atau sopan shantung), dan *pattemmu ataw* (pemaknaan positif).

Perilaku komunikasi *taro ada taro gau'* yang di dasarkan pada perinsip di atas dan dilaksanakan dengan suatu strategi sejalan dengan prinsip Islam, yang menekankan pentingnya menjaga ucapan, demikian pula dengan budaya Bugis yang menekankan “*adaemi nariaseng tau*” (manusia hanya bisa dipandang berdasarkan ucapannya). Dilandasi oleh konsep adat *pangngadereng* dengan *siri'* sebagai *driving force*-nya (daya dorong), yang pada hakekatnya berisi ajaran keharusan menjunjung harkat martabat manusia, merupakan kearifan local yang menjadi landasan utama dalam berperilaku, terutama dalam berkomunikasi sesama manusia.

Dalam banyak kenyataan membuktikan, bahwa hanya bangsa yang terbuka untuk menerima unsur dari luar yang dapat melakukan modernisasi. Sikap keterbukaan *openess* ini telah melekat pada diri orang Bugis, dimana salah satu bukti keterbukaan orang Bugis, adalah kebiasaan merantau dengan meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam perantauannya mereka melakukan perkawinan exogamy untuk memasuki dan menerima etnis lain, sehingga membentuk komunitas Bugis di negeri perantau.

Agama Islam sebagai agama baru yang dianut orang Bugis pada abad XVII, telah membawa perubahan signifikan dalam *pangngadereng*, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam ibadah, maupun dalam membangun masyarakat. Sistem *pangngadereng* dengan unsure-unsurnya : *ade'* (kebiasaan), *bicara'* (asas peradilan), *rapang'* (keteladanan), *wari'* (kepekaan sosial), *sara'* (nilai-nilai Islam), menjadi tuntutan dalam Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam selaras dengan budaya Bugis, dan Bugis selaras dengan Islam. Karna itu bagi orang Bugis yang tidak beragama Islam dianggap bukan orang Bugis.

G. Kerangka Konseptual

Masyarakat merupakan obyek dari sosiologi terutama dilihat dari hubungan antar manusia serta proses timbal balik dari hubungan tersebut. Proses timbal balik antara individu dan individu serta kelompok dengan kelompok itu melalui suatu proses interaksi sosial. Interaksi adalah kunci dari semua proses kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama dan bermasyarakat.

Orang Bugis perantau adalah bahagian dari anggota masyarakat melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari proses hubungan sosial yang merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial di perantauan, pada masyarakat yang heterogen atau plural. Interaksi sosial dicirikan oleh konteks sosial masyarakat itu sendiri yang berwatak paguyuban atau patembayan. Kaitan antara ciri-ciri di atas mempunyai hubungan dengan bentuk-bentuk atau pola interaksi sosial seperti kontak sosial komunikasi, kerja sama, kompetisi, konflik dan akomodasi, atau integrasi. Sehingga orang Bugis perantau dapat menjalankan aktifitas dan perilaku sosial ekonominya, disamping itu orang Bugis perantau dapat melakukan hubungan dengan daerah asalnya .

Keberhasilan suatu interaksi apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, dan merasa bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari kelompok masih sangat besar, dengan sendirinya anggota akan tetap bertahan di dalam

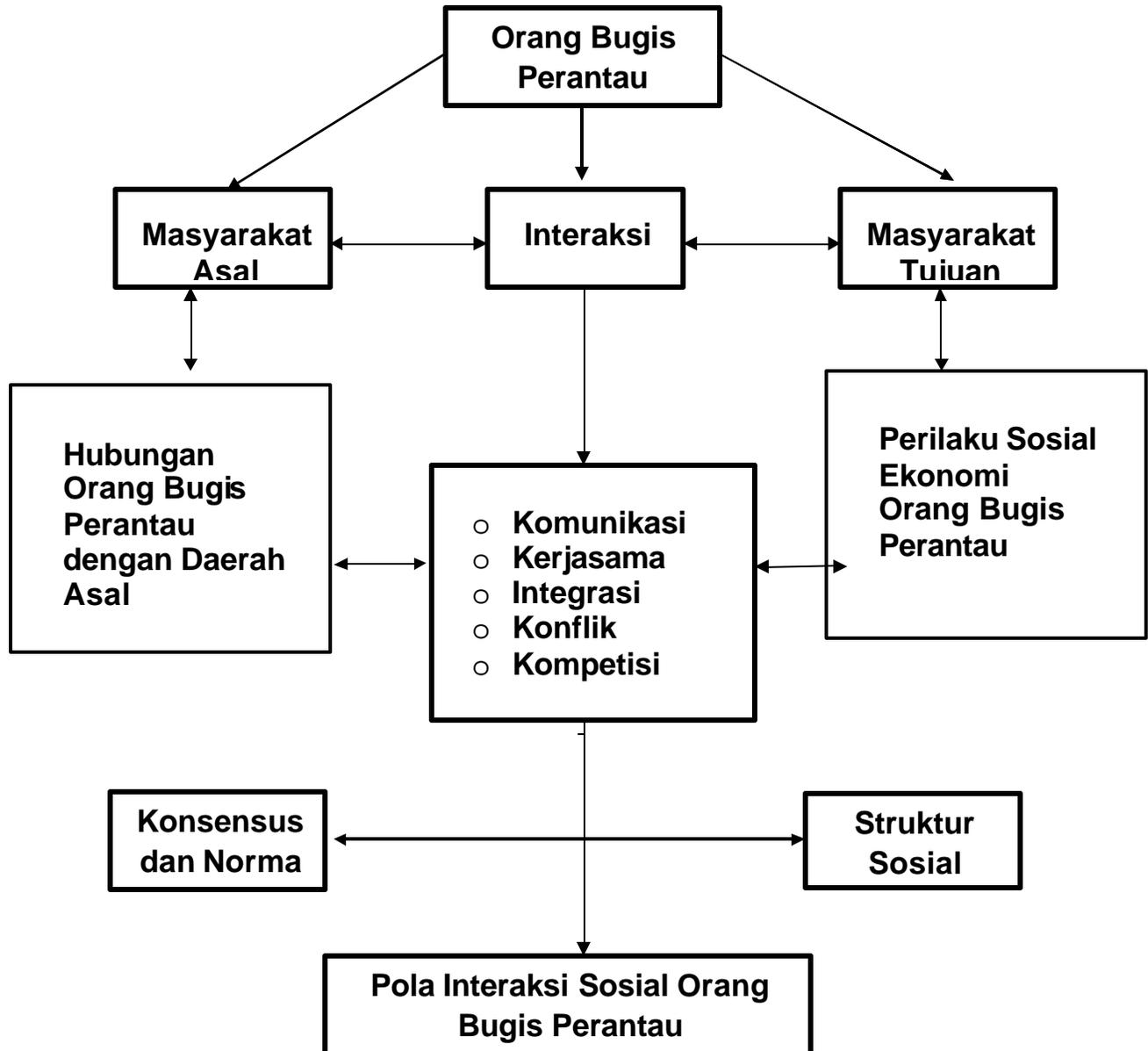
kelompoknya. Kemudian tercapailah semacam konsensus, penyesuaian paham tentang norma-norma yang berlaku cukup konsisten dan karenanya membentuk suatu struktur yang jelas agar supaya orang mengetahui apa yang mereka harapkan dari suatu kelompok masyarakat.

Masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok yang mula-mula berbeda kebudayaan dan tradisinya, tetapi dengan adanya kontak, adaptasi, dan interaksi sosial yang berjalan intensif, berhasil membentuk suatu kebudayaan berdasarkan penyesuaian diri dengan situasi obyektif yang ada, dan berdasarkan hal inilah akan terbentuk struktur sosial yang baru. Suatu contoh konsep struktur sosial yang menekankan pada pola perilaku yang berulang-ulang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat dari suatu pengamatan bahwa masyarakat pendatang cenderung memiliki ikatan primordial tinggi, dengan adanya penyatuan dengan anggota masyarakat lain, dapat terbentuk ikatan-ikatan baru yang diasumsikan dapat memiliki tingkat integrasi sosial yang tinggi karena mendambakan suatu kehidupan baru, kehidupan yang aman, dan

Tenteram serta membentuk pola interaksi sosial orang Bugis perantau.

Sebagaimana tergambar pada skema berikut ini:



Gambar 1. Skema kerangka konseptual pola interaksi sosial orang Bugis perantau di kota Samarinda dan Palu